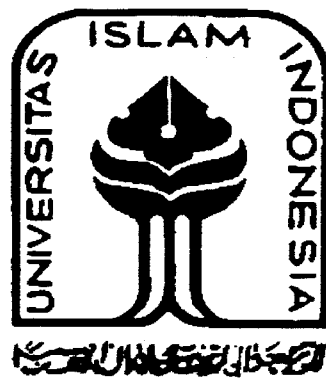


**ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 1989 – 2003
(STUDI KASUS KOTA PADANG)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Bunga Paramita
Nomor Mahasiswa : 01 313 159
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 1989 – 2003
(STUDI KASUS KOTA PADANG)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang sarata I
Program Studi Ekonomi Pembangunan.
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

oleh :

Nama : Bunga Parawita
Nomor Mahasiswa : 01 313 159
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

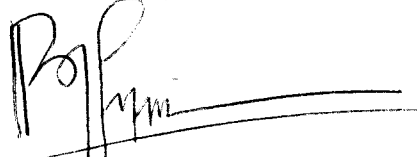
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksudkan dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 31 Januari 2005

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bunga Paramita', with a long horizontal flourish extending to the right.

Bunga Paramita

PENGESAHAN

ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 1989 – 2003
(STUDI KASUS KOTA PADANG)

Nama : Bunga Paramita
Nomor Mahasiswa : 01 313 159
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 31 Januari 2005
telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dra. Ari Rudatin, M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH 1989 - 2003 STUDI KASUS KOTA PADANG SUMATERA BARAT**

**Disusun Oleh: BUNGA PARAMITA
Nomor mahasiswa: 01313159**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 14 Februari 2005

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Ari Rudatin, M.Si

Penguji I : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji II : Dra. Indah Susantun, M.Si

Ari Rudatin
.....
Edy Suandi Hamid
.....
Indah Susantun
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

(Q. S. Al Baqarah, 2 : 45)

“ Katakanlah : adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran “ (Q. S . Al Mujaadilah : 11)

“Hidup tidak mengharuskan kita untuk menjadi yang terbaik, melainkan hanya supaya kita harus berupaya sebaik mungkin”

(H. Jackson Brown Jr)

“Genggamlah hari lalu sebagai saksi yang adil, keberadaanmu hari ini akan menjadi bukti kalau kemarin kau telah berbuat kejelekan, gandakan kebaikan hari ini maka kau akan terpuji, jangan menunda kebaikan hari ini hingga hari esok, Boleh jadi hari esok datang kau telah pergi.

Hari yang berlalu tak akan pernah kembali. . . ”

(Y. Qardiawi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah Karya...

Dalam rangka memantapkan langkah menuju cita-cita...

kupersembahkan kepada

Allah SWT

Kedua Orangtuaku... kepada kalianlah segala baktiku

Adik-adik dan Keluarga Besar ku...

Atas ketulusan doa, dukungan, harapan, cinta serta kasih sayangnya

dan almamater ku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan segala kenikmatanNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. skripsi ini berjudul “ ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1989 – 2003 STUDI KASUS KOTA PADANG”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan derajat gelar S1 (Sarjana Ekonomi) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selesainya tugas ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak untuk memperlancar proses study maupun penelitian, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ari Rudatin, M. Si, sebagai pembimbing utama yang tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dan Dra. Indah Susantun, M. Si, selaku dosen penguji, atas saran dan koreksinya untuk perbaikan skripsi ini.
3. Drs. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Kepala Kesbang dan Linmas Propinsi Sumatera Barat yang telah memberi izin selama pencarian data yang diperlukan
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan izin selama pencarian data yang diperlukan.
6. Seluruh Staf Kantor BPS Propinsi Sumatera Barat dan BPS Kota Padang yang telah memberikan bantuan dalam pencarian data dari awal hingga akhir.
7. Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Teman-teman *Part Time* di Perpustakaan Fakultas Ekonomi UII, atas diskusi dan tukar pikiran, serta nasehat-nasehatnya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku di Ekonomi Pembangunan UII Angkatan 2001, yang sangat besar kontribusinya dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Kos Pondok Putri Biru, atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran akan penulis perhatikan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Daftar Isi	viii
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sitematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	13
2.1 Sejarah Singkat Kota Padang.....	13
2.2 Geografi Kota Padang.....	14
2.3 Pemerintahan Kota Padang	15
2.4 Perkembangan Perekonomian Sumatera Barat.....	16

2.5	Perkembangan Perekonomian Kota Padang.....	18
2.5.1	Pertumbuhan PDRB.....	20
2.6	Pertanian.....	23
2.7	Industri dan Energi.....	25
2.8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	26
2.8.1	Penerimaan Daerah.....	26
2.8.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.8.1.2	Sumbangan dan Bantuan.....	29
2.8.2	Pengeluaran Daerah.....	31
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....		33
3.1	Ardito Binadi.....	33
3.2	Asnafiah Yuliati	33
3.3	Fachrully Rahemayati.....	34
3.4	Purnama Wijaya.....	35
3.5	Ria Andriani	35
3.6	Sudono Susanto.....	36
3.7	Yusrizal.....	38
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....		40
4.1	Landasan Teori.....	40
4.1.1	Sistem Desentralisasi Fiskal.....	40
4.1.2	Pekembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah..	42
4.1.3	Tujuan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah.....	43
4.1.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah.....	44

4.1.4.1	Faktor Manusia Pelaksana.....	44
4.1.4.2	Faktor Peralatan.....	44
4.1.4.3	Kebijakan Keuangan Negara.....	45
4.1.4.4	Kebijakan Keuangan Daerah.....	46
	a. Penerimaan Daerah.....	46
	b. Pengeluaran Daerah.....	53
4.1.5	Desentralisasi Fiskal.....	54
4.1.6	Derajat Otonomi Fiskal Daerah.....	55
4.1.7	Tingkat Perkembangan Perekonomian.....	56
4.1.8	Teori Pendukung Hipotesis.....	57
4.2	Hipotesis Penelitian.....	59
BAB V METODE PENELITIAN.....		61
5.1	Lokasi Penelitian.....	61
5.2	Jenis dan Sumber Data.....	61
5.3	Metode Analisis Data.....	62
5.3.1	Analisis Deskriptif.....	62
5.3.2	Analisis Kuantitatif.....	62
	5.3.2.1 Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat.....	62
	5.3.2.2 Derajat Otonomi Fiskal.....	63
	5.3.2.3 Pengujian Hipotesis.....	64
	a. Uji F (Koefisien Regresi Serempak).....	64
	b. Uji t (Pengujian Secara Serempak).....	65

c.	R^2 (Koefisien Determinasi).....	66
d.	Pengujian Asumsi Klasik.....	67
1	Multikolinieritas.....	68
2	Heteroskedastisitas.....	68
3	Autokorelasi.....	68
BAB VI	ANALISIS DATA	70
6.1	Deskripsi Data.....	70
6.2	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	71
6.3	Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pusat.....	73
6.4	Analisis Hasil Regresi.....	73
6.5	Uji Hipotesis.....	75
6.5.1	Uji F.....	75
6.5.2	Uji t.....	76
6.5.2.1	Uji Satu Sisi Parameter Variabel PDRB riil.....	77
6.5.2.2	Uji Satu Sisi Parameter Variabel Transfer dari Pemerintah Pusat.....	77
6.5.2.3	Uji Satu Sisi Parameter Variabel Tabungan Pemerintah Daerah.....	78
6.5.2.4	Uji Satu Sisi Parameter Variabel Dummy.....	79
6.5.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	79
6.5.4	Interpretasi Masing-masing Variabel Independen.....	80
6.5.5	Uji Asumsi Klasik.....	81

6.5.5.1 Uji Multikolinieritas.....	81
6.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	82
6.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	83
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	85
7.1 Kesimpulan.....	85
7.2 Implikasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 – 2002.....	7
2.1	PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (1993) tahun 1989 – 2002.....	17
2.2	PDRB dan Pendapatan Perkapita Kota Padang atas Harga Konstan (1993) tahun 1993-2003.....	19
2.3	Distribusi Persentase PDRB Kota padang Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 1993 – 2003.....	21
2.4	Jenis Pertanian dan Tanaman Pangan di Kota Padang tahun 1999 – 2002.....	24
2.5	Jenis Tanaman Perkebunan di Kota Padang tahun 2001-2002.....	24
2.6	Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 1996 – 2003.....	28
2.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota padang.....	30
2.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang.....	32
6.1	Hasil Regresi variabel dependen dan Variabel Independen.....	74
6.2	Pengujian Variabel Independen Dengan Uji t-statistik.....	76
6.3	Hasil Uji Antara Variabel Independen.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skema Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah.....	4
6.1 Uji F – Statistik.....	76
6.2 Uji satu sisi pada variabel PDRB riil (X_1).....	77
6.3 Uji satu sisi pada variabel transfer dari pemerintah (X_2).....	78
6.4 Uji satu sisi pada variabel tabungan Pemerintah Daerah (X_3).....	79
6.5 Uji satu sisi pada variabel dummy (D).....	79
6.6 Pengujian Autokorelasi.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I Data Yang Digunakan Dalam Analisis.....	88
II Data Derajat Desentralisasi Fiskal.....	89
III Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	90
IV Data Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat.....	91
V Hasil Regresi dan Plot Regresi.....	92
VI Uji Heteroskedastisitas Menggunakan White No Cross Term Test.....	93
VI Plot Uji Heteroskedastisitas Menggunakan White No Cross Term Test..	93
VII Uji Heteroskedastisitas Menggunakan White Cross Term.....	94
VIII Plot Uji Heteroskedastisitas Menggunakan White Cross Term.....	95
IX Uji Klein X1 X2.....	96
IX Uji Klein X1 X3.....	96
X Uji Klein X1 D.....	97
X Uji Klein X2 X3.....	97
XI Uji Klein X2 D.....	98
XI Uji Klein X3 D.....	98
XII Scatter Plot dari data yang dianalisis.....	99
XIII Peta Kota Padang.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita akan pentingnya menggagaskan kembali konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak belakang dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai keraknyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Mardiasmo, 2002: 95)

Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidak berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN. (Elmi, 2002: 45)

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan konsepsinya, pelaksanaan Otonomi Daerah pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Artinya penyelenggaraan Otonomi Daerah lebih menitikberatkan pada peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. Sebagai

konsekuensinya pemerintah daerah lebih mematuhi arahan dan instruksi pemerintah pusat dari pada memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.

Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lalu adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada praktiknya asas dekonsentrasi adalah bentuk halus dari pelaksanaan sentralisasi. Hal tersebut diperkuat dengan ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. (Mardiasmo, 2002: 130)

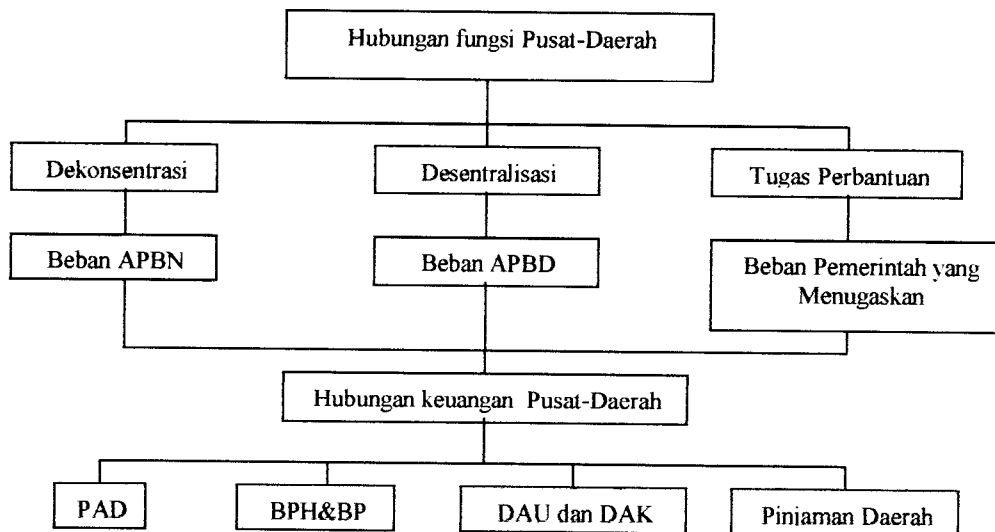
Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa sekarang lebih dipahami sebagai hak yaitu hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah pada era reformasi sekarang ini adalah lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada dasarnya UU No. 22 tahun 1999 juga masih menggunakan asas-asas pemerintahan dalam UU No. 5 tahun 1974. Asas-asas tersebut adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berpijak pada tiga asas tersebut, pengaturan hubungan keuangan pusat - daerah didasarkan atas 4 prinsip (Kuncoro, 2004: 7):

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD

3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Gambar 1.1
Kerangka Hubungan Pusat-Daerah



Sumber : Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Mardiasmo, 2002

Dari gambar 1.1 dapat dilihat UU No. 22 tahun 1999 mengatur tentang pembiayaan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebutkan dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) sebagai berikut (UU Otonomi Daerah, 2000: 31):

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (2) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat didaerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Ketidak seimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Daerah selama ini menyebabkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada bantuan dari Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali DKI Jakarta yang mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. (Elmi, 2002: 55)

Dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, akan lebih memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan menjalankan roda pembangunan.

Mulai tahun anggaran 2001 diharapkan merupakan awal dari “daerah membangun”. Selain dari pada itu, melalui kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian kue nasional yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan dengan jumlah yang lebih besar, sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Elmi, 2002: 55)

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut Otonomi Daerah dengan penuh harapan,

sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alam menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.

Untuk meningkatkan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu hal yang perlu dilakukan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal dan menutupi kesenjangan fiskal adalah melalui pembenahan manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu dibenahi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah (Elmi, 2002: 140)

Adapun aspek manajemen penerimaan daerah meliputi manajemen Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Dana Alokasi Umum. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk menggunakan kedua sumber penerimaan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembelanjaan dari daerah. Manajemen penerimaan dari daerah Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat
1997 – 2002
(000 Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	1997	1998	1999	2000	2001	2002
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sisa lebih Anggaran tahun lalu	10.108.203	14.800.091	30.397.272	121.479.622	110.600.690	258.449.329
2	PAD	41.407.364	43.939.311	57.413.821	60.254.734	96.678.840	127.771.431
	▪ Pajak Daerah	11.889.182	20.181.665	27.207.130	30.776.376	42.721.499	52.995.751
	▪ Retribusi Daerah	25.385.992	18.082.654	19.859.865	22.243.299	32.789.457	47.681.962
	▪ Laba BUMN	530.606	1.098.034	2.889.775	1.886.156	3.719.125	6.807.784
	▪ Lain-lain	3.462.652	4.245.873	7.457.051	5.348.903	17.448.762	20.285.934
3	Bagian Dana Perimbangan	55.446.541	64.505.820	91.534.441	81.118.597	260.812.692	219.545.269
4	Sumbangan dan Bantuan	396.353.771	469.070.798	662.212.087	526.378.454	1.570.557.660	2.015.178.524
5	Pinjaman Pemerintah Daerah	2.522.270	22.723.992	56.963	-	8.803.967	4.683.880
	TOTAL	505.838.149	615.040.012	841.624.584	889.231.407	2.057.454.859	2.625.628.433

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, berbagai edisi

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat pada tahun 1997 mencapai Rp 505.838.149 dan terus mengalami peningkatan mencapai Rp 2.625.628.433 pada tahun 2002. Jika dilihat dari tabel 1.1 Penerimaan terbesar yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat berasal dari Sumbangan dan Bantuan, dengan dicanangkannya pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat, hal seperti ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang sebenarnya. Untuk terciptanya Otonomi Daerah yang sebenarnya, pemerintah daerah yaitu kabupaten atau kota dituntut secara kreatif untuk dapat menawarkan dan menggali potensi dan kekayaan didaerahnya. Selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Dalam praktek perkembangan perimbangan fiskal antara Pusat-Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah tersebut, yang secara leluasa digali untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri masih mempunyai beberapa kelemahan. Sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut, bisa menjadi ketergantungan terhadap alokasi dana dari Pemerintah Pusat. Dengan latar belakang demikianlah maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **Analisis Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1989 – 2003 (Studi Kasus Kota Padang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal Kota Padang.
2. Bagaimana pengaruh PDRB riil (X1) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
3. Bagaimana pengaruh bantuan serta subsidi dari pemerintah pusat (X2) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
4. Bagaimana pengaruh variabel tabungan pemerintah daerah (X3) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
5. Bagaimana pengaruh variabel dummy (D) yaitu penerimaan daerah sebelum otonomi daerah (0) dan setelah otonomi daerah (1) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal Kota Padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB riil terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.

3. Untuk menganalisis pengaruh perkembangan bantuan berdasarkan total transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
4. Untuk menganalisis pengaruh perkembangan tabungan pemerintah daerah, terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel dummy yaitu penerimaan daerah sebelum otonomi daerah (0) dan setelah otonomi daerah (1) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
6. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi perencanaan dan pembuat kebijakan dalam menentukan arah dan strategi pembangunan ekonomi daerah, di Kota Padang.
2. Bagi kepentingan peneliti adalah sebagai wujud penerapan ilmu yang selama ini telah didapatkan pada masa kuliah, yang digunakan sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan analisis perimbangan pembiayaan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
4. Memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian berikutnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Berisi mengenai gambaran umum daerah penelitian yang meliputi keadaan wilayah dan kondisi perekonomian Kota Padang.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai gambaran penelitian yang dilakukan sebelumnya, sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian ini.

BAB IV : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Berisi tentang teori-teori yang melandasi dan mendasari penelitian, sehingga dapat mendukung penelitian serta hipotesis yang dilakukan.

BAB V : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode serta pengujian penelitian yang dilakukan.

BAB VI : ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang deskripsi data dan analisis data.

BAB VII : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini merupakan uraian dari kesimpulan dan implikasi sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Sejarah singkat Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu Kota tertua dipantai Laut Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17) Kota Padang ditempati oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Ketika itu Kota Padang belum begitu penting karena arus perdagangan *Orang Minang* mengarah kepantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah kepantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Pagaruyuang berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas.

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang bersih dan nyaman. Belanda berhasil menguasai Padang pada Tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 Belanda membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi kemudian daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan.

Akhirnya pada Tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangan di Sumatera Barat. Kota Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur dan Industri Semen Padang.

2.2 Geografi Kota Padang

Padang sebagai ibu kota propinsi Sumatera Barat yang terletak dipantai barat pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44'00''$ dan $1^{\circ}08'35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ}05'05''$ dan $100^{\circ}34'09''$ Bujur Timur. Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah $694,96 \text{ km}^2$. Namun yang dapat dibudidayakan hanyalah seluas lebih kurang $205,007 \text{ km}^2$, dan selebihnya merupakan daerah perbukitan (termasuk daerah aliran sungai).

Keseluruhan luas Kota Padang, yaitu sekitar 52,52 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah, untuk bangunan dan pekarangan seluas 9,01 persen atau $62,63 \text{ km}^2$ sedangkan untuk lahan sawah seluas 7,52 persen atau $52,25 \text{ km}^2$.

Jika diperhatikan Kota Padang letaknya berbatasan dengan tiga daerah kabupaten dan satu samudera. Disebelah Utara, berbatasan dengan kabupaten Padang Pariaman, disebelah Selatan dengan kabupaten Pesisir Selatan, disebelah Timur dengan kabupaten Solok dan disebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Wilayah daratan Kota Padang yang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan.

Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Dengan kondisi wilayah Kota Padang yang demikian, menyebabkan curah hujan di Kota Padang cukup tinggi. Tahun 2003 tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,88 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari perbulan. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 23° - 32° C pada siang hari, sedangkan pada malam hari berkisar antara 22° - 28° C. Kelembaban udara berkisar antara 78 – 81 persen dengan kecepatan angin rata-rata antara 5-6 knot.

Sehubungan dengan letak Kota Padang dengan kota-kota lainnya di Sumatera maupun dengan pulau-pulau lainnya cukup strategis maka akan dikembangkan dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Ketaping serta pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai gerbang utama perdagangan Sumatera Barat.

2.3 Pemerintah Kota Padang

Kota Padang sebagai wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dengan dasar hukum dekonsentrasi wilayah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, pada awalnya memiliki 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Sekarang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, maka nama Kotamadya daerah Tingkat II Padang berubah menjadi Kota Padang dengan 11 Kecamatan dan 103 Kelurahan dan jumlah penduduk tahun 2003 telah mencapai 765.450 jiwa hal ini meningkat dari jumlah 734.421 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannya pun bertambah dari 1.057

jiwa/km² menjadi 1.101 jiwa/km² memiliki suku yang mendiami wilayah Kota Padang beranekaragam (heterogen), tetapi akar sosial budayanya adalah *Minangkabau*

Sampai saat ini telah ada 12 walikota yang memimpin Kota Padang sejak masa awal kemerdekaan sampai sekarang, mulai dari Bapak Abubakar Jaar, SH sampai dengan Bapak Drs Zuiyen Rais, MS. Selama periode tersebut telah terjadi beberapa peristiwa yang penting, seperti perluasan kota dan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai kewenangannya, Pemerintah kota Padang didukung oleh 13.077 orang personil. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah kota padang terus berupaya meningkatkan taraf pendidikan jajaran personilnya. Adapun usaha yang dilakukan adalah dengan pemberian izin belajar maupun pemberian tugas belajar kejenjang yang lebih tinggi.

2.4 Perkembangan Perekonomian Propinsi Sumatera Barat

Akibat krisis moneter pertengahan tahun 1997, kondisi sosial ekonomi Propinsi Sumatera Barat mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Memasuki abad 21 yang akan memberlakukan pasar bebas maka secara perlahan Pemerintah Daerah Sumatera Barat berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi daerahnya.

Tabel 2.1
PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (1993)
Tahun 1989 – 2002
(Juta Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan (1993)	
	Nilai	Pertumb (%)	Nilai	Pertumb (%)
1989	2 913 328	1,79	1 712 063	1,64
1990	3 302 504	1,75	1 832 399	1,63
1991	3 733 093	1,71	1 948 122	1,63
1992	4 273 614	1,72	2 078 386	1,61
1993	6 027 052	1,86	6 027 052	1,86
1994	7 217 921	1,92	6 475 855	1,86
1995	8 267 123	1,87	7 054 198	1,93
1996	9 514 827	1,86	7 609 545	2,04
1997	10 744 737	1,88	8 000 662	2,10
1998	17 642 740	2,18	7 458 575	2,36
1999	20 514 655	2,07	7 577 036	2,03
2000	22 462 448	1,88	7 868 238	1,93
2001*	25 415 081	1,86	8 153 962	1,93
2002*	29 106 779	1,89	8 503 928	1,94

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, berbagai edisi
 * Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.1 pada tahun 2002, secara nominal terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 3.69 trilyun rupiah yaitu menjadi 29.12 trilyun rupiah dari 25.43 trilyun rupiah pada tahun 2001. Namun kenaikan tersebut belum mampu mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 1993 mencapai 8.50 trilyun rupiah pada tahun 2002, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2001 sebesar 8.50 trilyun rupiah, dengan kata lain Provinsi Sumatera Barat mengalami

pertumbuhannya sebesar 4.29 persen pada tahun 2002. Hal ini terlihat dari kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2002 yang sanggup diciptakan dan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2001. Meningkatnya kinerja pembangunan ekonomi Sumatera Barat ini disebabkan oleh karena kondisi sosial, politik maupun keamanan yang mulai stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama pada tahun 2001.

2.5 Perkembangan Perekonomian Kota Padang

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, jika dilihat tingkat perekonomiannya pada saat terjadi krisis ekonomi masih bisa dianggap beruntung bila dibandingkan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat. Karena daerah ini masih mampu bertahan, hal ini terlihat dari realisasi anggarannya pada tahun 1997 yang mengalami peningkatan sebesar 12.06 % dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan kondisi perekonomian Kota Padang pada tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2.682,46 milyar tahun 2002 menjadi 2.816,07 milyar pada tahun 2003, atau secara nominal naik sebesar 133,60 milyar (tabel 2.2)

Tabel 2.2
PDRB Dan Pendapatan Per kapita Kota Padang Atas Harga Konstan (1993)
Tahun 1993 – 2003
(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	Pendapatan Per Kapita
1993	1.817.542	2.693
1994	1.979.343	2.847
1995	2.157.831	3.037
1996	2.361.973	3.233
1997	2.510.421	3.344
1998	2.319.689	2.955
1999	2.359.246	3.001
2000	2.467.475	3.459
2001	2.562.850	3.525
2002*	2.682.462	3.609
2003**	2.816.070	3.736

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha,
 Badan Pusat Statistik Kota Padang, berbagai edisi

Catatan : * Angka diperbaiki
 ** Angka sementara

Perkembangan perdagangan ekspor impor diikuti juga oleh peningkatan pendapatan regional. Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang mempunyai peranan penting serta mendominasi dan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menunjang perekonomian Kota Padang, antara lain adalah pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 31.24%, sektor perdagangan sebesar 21.65%, sektor industri sebesar 14.33%, sektor jasa sebesar 12.77%, dan keuangan sebesar 7.24%. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang mengambil kebijakan dalam pelaksanaan

pembangunan yaitu dengan mengarahkan Kota Padang menjadi Kota perdagangan dan perindustrian, sehingga diperkirakan akan mampu mempercepat pertumbuhan dari daerah tersebut. Untuk menunjang hal ini maka pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Sumatera Barat pada umumnya juga melaksanakan pembangunan dibidang perhubungan dan transportasi, seperti pembangunan Bandara Internasional Ketaping dan perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. Dalam hal peningkatan dibidang industri, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan akan dikembangkan Padang Industrial Park, daerah pengembangan Industrial Park tersebut dipusatkan di Kota Padang.

2.5.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Selain itu juga menggambarkan aktivitas perekonomian suatu daerah, semakin tinggi tingkat produktivitas daerah maka PDRB akan semakin besar. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui jika data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikaji dari sudut perbandingan besaran (nilai) atas dasar harga konstan, sedangkan struktur ekonomi dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap total (PDRB).

Tabel 2.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 1993 – 2003

Sektor (1)	1993 (2)	1994 (3)	1995 (4)	1996 (5)	1997 (6)	1998 (7)	1999 (8)	2000 (9)	2001 (10)	2002* (11)	2003** (11)
1. Pertanian	3.80	3.81	3.83	3.93	3.53	3.71	3.90	3.85	3.87	3.87	3.59
2. Pertambang & pertambangan	1.67	1.95	2.17	2.27	3.11	1.98	1.77	1.68	1.64	1.64	1.54
3. Industri Pengolahan	21.76	21.70	21.47	23.13	21.83	19.63	17.14	16.17	15.87	15.01	14.33
4. Listrik, gas & Air Bersih	1.53	1.45	1.61	1.92	2.08	1.78	1.90	2.19	2.43	3.06	3.54
5. Bangunan	4.43	4.29	4.25	4.52	6.01	4.95	4.09	4.15	4.26	4.06	4.10
6. Perdagangan, hotel & Restoran	21.02	21.29	20.69	20.02	19.53	22.60	23.20	23.39	23.50	22.58	21.65
7. Pengangkutan & komunikasi	23.00	23.58	24.54	24.22	24.19	25.41	26.89	27.38	27.69	29.70	31.24
8. Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan	9.69	9.19	8.62	7.73	7.41	7.42	7.10	7.11	7.13	7.06	7.24
9. Jasa-jasa	13.11	12.73	12.82	12.26	12.31	12.53	14.00	14.07	13.61	13.20	12.77
PDRB	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Badan Pusat Statistik Kota Padang, berbagai edisi

Catatan : * Angka diperbaiki

** Angka sementara

Berdasarkan tabel 2.3, jika dilihat secara sektoral pada tahun 1997 sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi sebesar 19,53 persen dimana hal ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 20,02 persen pada tahun 1996, namun krisis ekonomi tidak berpengaruh terhadap sektor ini. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan menjadi 22,60 persen pada tahun 1998 .

Kontribusi terbesar yang diberikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut terdapat pada tahun 2001 yaitu sebesar 23,50 persen. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mempunyai kontribusi diatas 7 persen setiap tahunnya terdapat pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan yang terakhir adalah sektor jasa-jasa. Walaupun sektor lainnya mempunyai kontribusi dibawah 7 persen, namun hal tersebut merupakan pendapatan yang dapat membantu peningkatan pembangunan di Kota Padang.

Untuk menghitung Produk Domestik regional Bruto (PDRB) tidak hanya berdasarkan pada harga berlaku, namun dapat juga berdasarkan pada harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pada harga berlaku merupakan penjumlahan atas seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi pada periode tertentu dan nilainya tersebut dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan untuk Produk Domestik regional

Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan pada harga konstan menggambarkan pertumbuhan volume produksi dimana perubahan harga dipengaruhi inflasi yang hilang dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, selain itu Produk Domestik regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dapat dipergunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun.

2.6 Pertanian

Kota Padang memiliki potensi besar dibidang pertanian, lahan yang digunakan untuk sektor ini cukup besar, meskipun Kota Padang sebagai daerah perkotaan, yang bercirikan daerah industri dan jasa. Hal ini masih terlihat dari hasil produksi padi sawah tahun ini yang mengalami peningkatan dari 81.918 ton pada tahun 2001 menjadi 83.039 ton pada tahun 2002. Sedangkan produksi tanaman Palawija mengalami peningkatan yang bervariasi. Untuk tanaman jagung mengalami peningkatan 522 ton pada tahun 2001 menjadi 582 ton pada tahun 2002. Produksi kedele mengalami penurunan 55 ton pada tahun 2001 menjadi 8 ton pada tahun 2002. Hal ini disebabkan adanya pengurangan area tanaman seluas 41 Ha. Hal ini juga dialami oleh kacang tanah yaitu dari 6.139 ton pada tahun 2001 turun menjadi 6.025 ton pada tahun 2002 (tabel 2.3)

Tabel 2.4
Jenis Pertanian dan Tanaman Pangan di Kota Padang
Tahun 1999 - 2002
(ton)

Jenis Tanaman	1999	2000	2001	2002
Padi Sawah	93.980	83.184	81.918	83.039
Jagung	831	460	522	582
Ubi Kayu	15.17	15.17	2.371	3.034
Ubi Jalar	433	496	317	401
Kedele	90	45	55	8
Kacang Tanah	126	100	156	101
Kacang Hijau	8	8	3	1

Sumber : Kota Padang Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Padang, berbagai edisi

Total areal tanaman perkebunan rakyat di Kota Padang pada tahun 2002 adalah seluas 745 ha, dengan beberapa jenis tanaman yang dikembangkan yaitu kulit manis, tanaman kopi, tanaman karet, pala, coklat, pinang, dan gambir. Adapun tabelnya dari jenis penerimaan perkebunan di Kota Padang dalam ton adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Jenis Tanaman Perkebunan di Kota Padang
Tahun 2001 - 2002
(ton)

Jenis Tanaman	2001	2002
Kulit Manis	110	124
Kopi	26.5	34
Karet	63	71
Pala	30.50	28
Coklat	15	18
Pinang	10	19
Gambir	26	23
Cengkeh	7.5	8
Kelapa	915	955

Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2002, Badan Pusat Statistik Kota Padang

Dari tabel 2.4 dapat dilihat produksi tanaman perkebunan rakyat selama tahun 2001-2002 cukup bervariasi, yaitu produksi kulit manis 110 ton tahun 2001 menjadi 124 ton pada tahun 2002. Produksi kopi 26.5 ton tahun 2001 menjadi 34 ton tahun 2002, produksi karet 63 ton tahun 2001 menjadi 71 ton pada tahun 2002. Produksi pala 30.50 ton pada tahun 2001 turun menjadi 28 ton pada tahun 2002, atau mengalami penurunan sebesar 8,1 persen. Produksi coklat 15 ton pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 18 ton pada tahun 2002. Untuk produksi pinang 10 ton pada tahun 2001 meningkat menjadi 20 ton pada tahun 2002 atau mengalami kenaikan sebesar 19 persen. Sedangkan untuk produksi kelapa pada tahun 2001 sebesar 915 ton mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 935 ton.

2.7 Industri Dan Energi

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Padang. Sektor yang dikembangkan pada umumnya adalah industri kecil hasil pertanian dan kehutanan, sektor ini merupakan sektor yang paling besar baik dari segi penyerapan tenaga kerja serta nilai investasi yang ditanam. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri ini pada tahun 2002 adalah sebanyak 19.854 orang untuk mendukung jalannya industri dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka PLN Kota Padang tahun 2003 telah memproduksi tenaga listrik dengan total daya sebesar 427.980.400 (VA).

2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.8.1 Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah ataupun keuangan daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah guna terlaksananya kegiatan daerah. Pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah tersebut dalam menata dan mengurus rumah tangganya begitupun dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Dalam hal ini pendapatan menempati posisi yang sangat penting dalam hal penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tersebut dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.

Penerimaan daerah dapat diperoleh dari, pertama dari sumber-sumber yang dapat dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh pendapatan dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan, dan penerimaan lainnya. Ketiga adalah berasal dari pinjaman yang diperoleh dari pemerintah daerah, baik dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah propinsi maupun yang berasal dari instansi pusat.

2.8.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana terbesar kedua penerimaan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya yang tentunya ditindak lanjuti yaitu dengan memberikan kompensasi berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN, dan penerimaan lain-lain. Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 1993 – 2003.

Tabel 2.6
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
Tahun 1993 – 2003
(Rp. 000)

No	PAD	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pajak Daerah	3.875.750	4.233.769	4.912.340	5.838.845	7.431.681	13.680.487	18.465.507	16.581.668	28.258.232	37.349.175	42.731.166
2	Retribusi daerah	6.112.135	7.311.863	7.976.470	9.650.981	10.931.467	7.576.789	6.661.218	5.776.211	9.693.176	12.127.913	13.084.453
3	Laba BUMD	125.000	75.000	150.000	150.000	-	363.817	417.221	539.870	934.319	2.610.065	4.162.054
4	Penerimaan Dinas"	778.84	887.34	5.131	8.142	11.670	-	25.287	43.157	18.338	18.623	-
5	Penerimaan lain"	517.113	438.254	382.630	397.132	357.210	140.976	900.355	132.722	447.133	939.776	-
	Total PAD	10.432.937	12.147.621	13.426.572	16.045.102	18.732.030	21.762.069	26.469.675	23.073.627	39.351.199	52.951.303	62.516.831

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Dari tabel 2.6 maka dapat kita lihat bahwa total Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 1996/1997 sebesar Rp. 16.045.102.000 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ketahun. Hal ini terbukti adanya total Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2003 sebesar Rp. 62.516.831.000 . Selain itu, sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya. Hal ini disebabkan karena pajak daerah tersebut banyak jenisnya, sehingga dapat menghimpun dana yang besar.

2.8.1.2 Sumbangan dan Bantuan

Sumbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan dari instansi pusat yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Bantuan adalah semua jenis bantuan atas inpres yang ditujukan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah propinsi. Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi terhadap Kota Padang mengalami penurunan pada tahun 2002 Berikut realisasi penerimaan daerah Kota Padang tahun 1996 – 2002

Tabel 2.7
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Padang
1996 - 2002
(Rp. 000)

Uraian Sektor (1)	1996 (2)	1997 (3)	1998 (4)	1999 (5)	2000 (6)	2001 (7)	2002 (8)
1. Sisa Lebih Pehitungan Th Lalu	1.404.955	2.91.888	1.779.528	1.138.988	2.059.895	2.825.558	17.032.595
2. PAD	16.045.102	18.817.547	21.762.071	26.449.412	34.027.758	39.351.199	54.083.435
3. Bagian dana perimbangan	50.689.284	61.442.543	67.258.831	87.808.793	107.079.744	226.269.259	254.430.405
• Bagi hasil pajak	7.127.197	8.068.181	7.258.289	7.822.856	10.644.301	16.960.317	18.547.172
• Bagi hasil bukan pajak	3.162.519	3.772.851	812.447	181.328	701.408	222.961	1.514.869
• DAU	32.651.697	38.861.646	46.815.970	63.752.327	95.734.035	164.373.576	233.830.000
• DAK	7.747.876	10.739.865	12.372.125	12.698.246	-	238.364	538.364
• Bantuan kontijensi	-	-	-	3.354.036	2.367.285	44.474.041	21.032.057
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	2.088.885	2.110.427	-	-	-	4.910.911	183.880
Jumlah / Total	68.139.346	82.751.978	90.800.430	115.397.193	145.538.682	278.579.845	346.762.372

Sumber : Kota Padang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Padang, berbagai edisi

2.8.2 Pengeluaran Daerah

Pengeluaran suatu daerah dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas sembilan komponen diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan dirinci menurut sektoral.

Belanja rutin daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai program kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain belanja rutin adalah dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah supaya dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam masa satu tahun anggaran.

Jumlah dana anggaran keperluan rutin akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam penggunaan sumber-sumber dana, dihadapkan dengan kebutuhan nyata pembiayaan tugas umum pemerintah daerah dan pemberian sarana serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan atas kajian empiris tampak bahwa anggaran rutin merupakan salah satu fungsi dari kenaikan pendapatan daerah. Artinya jumlah anggaran rutin akan mengalami kenaikan apabila pendapatan daerah meningkat. Pengeluaran pembangunan meliputi pembiayaan rupiah dan proyek, dialokasikan keberbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN),

pengeluaran pembangunan daerah merupakan investasi daerah yang diklarifikasikan berdasarkan sektor demi sektor yang menggambarkan kegiatan masyarakat di daerah.

Tabel 2.8
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang
2001 - 2002
(Rp. 000)

No	Pengeluaran Daerah	2001	2002
1.	Pengeluaran Rutin	245.452.122	289.249.180
	a. belanja pegawai	197.782.436	221.446.352
	b. belanja barang	16.446.754	24.147.994
	c. belanja pemeliharaan	6.429.639	5.823.080
	d. belanja perjalanan dinas	221.623	2.787.585
	e. belanjalain-lain	21.606.701	29.284.583
	f. angsuran hutang dan bunga pinjaman	287.816	2.188.525
	g. subsidi/ bantuan kepada daerah bawahan	234.920	411.088
	h. pengeluaran tidak termasuk bagian lain	1.441.966	1.763.929
	i. pengeluaran tidak tersangka	1.000.267	1.396.044
2	Pengeluaran Pembangunan	32.151.023	38.527.560
	Total Pengeluaran	277.603.145	327.776.740

Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2002, Badan Pusat Statistik Kota Padang

Berdasarkan tabel 2.8 dapat dilihat bahwa pengeluaran rutin pemerintah daerah Kota Padang tahun 2002 berasal dari belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 221,446.352 hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Ardito Binadi

Dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisa Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah (studi kasus proyek percontohan Otonomi Daerah di Daerah Tingkat II Sleman)“. Permasalahan yang masih menghambat bagi terwujudnya Otonomi Daerah di Dati II Sleman terutama dalam kerangka hubungan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat otonomi fiskal (DOF) dilihat dari tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (subsidi) di Daerah Tingkat II Sleman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di Daerah Tingkat II Sleman derajat otonomi fiskal (DOF) dipengaruhi secara positif oleh tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan dari pemerintah pusat (subsidi). Terjadinya penurunan posisi fiskal di Daerah Tingkat II Sleman.

3.2 Asnafiah Yuliati

Dalam jurnalnya yang berjudul “ Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Menyongsong Otonomi Daerah Studi Kasus Kabupaten Sleman DIY “ dengan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian terhadap pengeluaran adalah rasio PAD dan bantuan pemerintah pusat terhadap pengeluaran rutin, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran pembangunan. Selanjutnya untuk mengukur pengaruh peranan pemerintah daerah

terhadap Tingkat Perkembangan Ekonomi (TPE) digunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara riil serta variabel lainnya.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah mengalami peningkatan, dapat dilihat dari adanya rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah makin besar ketergantungan daerah terhadap pusat. Sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah didalam membiayai pengeluaran didominasi oleh adanya pajak dan retribusi daerah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena pendapatan dari pajak dan retribusi daerah tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

3.3 Fachrully Rahemayati

Penelitiannya yang berjudul “Tingginya Ketergantungan Fiskal di Kabupaten Sleman”, dengan ditunjuknya Kabupaten Sleman sebagai salah satu model percontohan Otonomi Daerah yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran Daerah Tingkat II Sleman dalam rangka menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2001. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pajak daerah memberi sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibandingkan sumber Pendapatan Daerah. Dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang cukup menggembirakan, tetapi Pendapatan Asli Daerah ini masih selalu lebih kecil dari pengeluaran rutin

dan pengeluaran pembangunan. Hal ini berarti daerah Sleman selama ini masih sangat tergantung pada subsidi dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Dengan masih besarnya tingkat ketergantungan fiskal menunjukkan belum mandiri sumber keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman.

3.4 Purnama Wijaya

Judul penelitian ini adalah “Otonomi Fiskal Daerah Tingkat II Kabupaten Oku dan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah terhadap derajat otonomi fiskal (DOF) dan untuk mengetahui pengaruh bantuan Pemerintah Pusat terhadap tingkat keuangan daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (subsidi) berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal daerah (DOF) di Daerah Tingkat II Oku dan Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.

3.5 Ria Andriani

Studi yang dilakukan oleh Ria Andriani mengenai “Analisis Kemampuan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau Dalam Kemandirian Pembiayaan Daerah Menyongsong Implementasi UU No. 25 Tahun 1999”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ria Andriani adalah dalam rangka menganalisis kemampuan serta kemandirian Kabupaten Indragiri Hulu dalam pembiayaan

daerah dan sekaligus untuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan pemerintah daerah ini terhadap bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kabupaten Indragiri Hulu sangat tergantung dengan adanya bantuan serta sumbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dimana proporsi bantuan dari masyarakat adalah sebesar 80% sementara sisanya berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain-lain .
2. Dari hasil pengolahan data time series kurun waktu 1989 – 1998 dengan menggunakan variabel dependen derajat fiskal daerah serta variabel independen X_1 (rasio bantuan pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_2 (laju PDRB berdasarkan harga konstan), X_3 (rasio tabungan pemerintah daerah dengan belanja pembangunan) secara bersama-sama variable-variabel pada model tersebut berpengaruh terhadap derajat fiskal daerah.
3. Rasio Total bantuan Pemerintah Pusat terhadap penerimaan APBD (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap derajat fiskal daerah.
4. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

3.6 Sudono Susanto (2001)

Studi yang dilakukan oleh Sudono Susanto dengan judul “ Analisis Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah di Kabupaten Banjarnegara”. Dalam penelitiannya, Sudono melihat bahwa praktek perkembangan antara

otonomi daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai beberapa kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadi ketergantungan terhadap alokasi pusat. Maka untuk menganalisis derajat otonomi fiskal tersebut dapat digunakan regresi sebagai berikut :

$$\text{DOF} = C_0 + a_1 \text{TPE} + a_2 \text{B} + u_t$$

Keterangan :

DOF : Derajat otonomi fiskal dalam persen

TPE : Tingkat Perkembangan Ekonomi Dalam persen

B : Bantuan dalam persen

u_t : Error term

Untuk melihat ketergantungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat perbandingan yaitu pendapatan daerah sendiri dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PDS / APBD)

Keterangan :

PDS : Pendapatan Daerah Sendiri (PAD + PPD)

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD + PPD + Bantuan)

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Desentralisasi fiskal Kabupaten Banjar negara masih sangat rendah, hal ini dapat diketahui dengan masih cukup besarnya proporsi bantuan atau subsidi Pemerintah Pusat terhadap total penerimaan daerah hingga mencapai 77,82 %. Selain itu proporsi Penerimaan Asli Daerah masih sangat rendah. Maka

dapat diketahui bahwa pembiayaan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Daerah Tingkat II Banjarnegara tidak seimbang.

2. Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarnegara masih mempunyai ketergantungan fiskal yang cukup besar terhadap Pemerintah Pusat.
3. Tingkat Perkembangan Perekonomian dan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap daerah berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal yang berarti mempunyai pengaruh terhadap Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah di Kabupaten Banjarnegara.

3.7 Yusrizal (1999)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap” yang bertujuan untuk melihat tingkat kemandirian fiskal dari daerah Cilacap. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), laju pertumbuhan APBD lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pembiayaan pembangunan daerah, peran pemerintah daerah lebih besar dibandingkan pemerintah pusat, karena dalam angka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disetiap daerah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensial daerah yang dapat memantapkan posisi keuangan daerah untuk menuju keuangan daerah yang mandiri.
2. Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan laju pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sama, tetapi karena persentase PAD terhadap APBD sekarang masih kecil maka pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi keuangan daerah.

Ketujuh penelitian di atas sama-sama menggunakan alat analisis regresi yaitu dengan menggunakan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagai variabel dependen dan tingkat perkembangan ekonomi (TPE), bantuan pemerintah pusat (subsidi) sebagai variabel independen, akan tetapi dengan lokasi penelitian yang berbeda-beda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan perimbangan fiskal Pusat-Daerah di Kota Padang, dimana yang dianalisis adalah derajat desentralisasi fiskal, dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat, PDRB konstan selain itu juga tabungan pemerintah daerah dan variabel dummy (yaitu penerimaan sebelum dan sesudah otonomi).

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

4.1 Landasan Teori

4.1.1 Sistem Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan konsepsi pelaksanaan Otonomi Daerah pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Artinya penyelenggaraan Otonomi Daerah lebih menitik beratkan pada peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah lebih mematuhi arahan dan instruksi pemerintah pusat dari pada memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini mudah dipahami karena pada waktu itu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kordinasi dan integrasi nasional untuk memantapkan stabilitas dan pembangunan nasional.

Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lalu adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pada prakteknya asas dekonsentrassi merupakan bentuk halus dari pelaksanaan sentralisasi. Hal ini diperkuat dengan ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2000: 130)

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintah, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara, selain itu dekonsentrasi dan desentralisasi merupakan klarifikasi atas sistem administrasi pemerintah daerah yang lebih populer digunakan. Hal ini tercermin dari pasal 18 serta UUD 1945 berserta serangkaian undang-undang

yang mengatur implementasinya yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan sebagainya.

Desentralisasi fiskal itu sendiri dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah.

Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Ketidakseimbangan fiskal yang terjadi antara Pusat-Daerah selama ini, menyebabkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat mencapai lebih dari 70 persen, kecuali DKI Jakarta yang mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akan lebih memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi dan menjalankan pembangunannya. Periode 2001 diharapkan merupakan awal dari “daerah membangun”. Selain dari pada itu, melalui kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian kue nasional yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar, sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Elmi, 2002: 55)

Otonomi Daerah juga dijelaskan pada UU No. 22 tahun 1999 yang merupakan pengganti UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah. Pengertian desentralisasi menurut UU No. 22 tahun 1999 ini adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Dalam UU No. 22 tahun 1999 pasal 4 juga disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tersebut dibentuk dan disusun oleh Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota.

4.1.2 Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Pembangunan Sektoral

Sebagai tambahan terhadap subsidi atau bantuan dengan adanya sejumlah pengeluaran yang berarti dari anggaran pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas-dinas di Provinsi. Alokasi utama pengeluaran jenis ini yaitu :

- a. Untuk departemen pekerjaan umum dapat berupa pengeluaran sektoral yang digunakan untuk pembangunan jalan negara maupun jalan-jalan yang ada diprovinsi, serta digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan proyek negara lainnya
- b. Untuk departement pertanian berupa pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Guna menunjang peningkatan serta kemajuan dalam bidang perekonomian

2. Pinjaman

Dalam hal ini dana pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah terutama berupa “inpres pasar” yang digunakan untuk program perbaikan kampung yaitu dengan adanya program perbaikan kampung. Dengan program ini bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah akan memberikan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kotamadya maupun kabupaten.

4.1.3 Tujuan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah

Hal ini menyangkut pada pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber-sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tsb. Tujuan utama dari pembiayaan fiskal pusat dan daerah ini adalah untuk mencapai perimbangan diberbagai bagian. Pembagian ini juga bertujuan agar antara potensi dan sumber daya masing-masing dapat sesuai. Alokasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi bentuk dan lingkupnya (Devas, 1997: 163) :

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebagian, biaya pelayanan atau program pembangunan, yang bersifat nasional yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional
2. Mendorong upaya pemerintah regional untuk program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional

3. Merangsang pertumbuhan ekonomi regional, baik untuk membantu pertumbuhan maupun mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Mengendalikan pengeluaran regional untuk memastikan penyesuaian terhadap standar kebijakan nasional
5. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil atau lebih adil
6. Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah
7. Membantu wilayah-wilayah tersebut untuk mengatasi keadaan darurat

4.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah

4.1.4.1 Faktor Manusia Pelaksana

Berhasil tidaknya otonomi daerah, sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dan faktor manusia pelaksana yang terdiri dari :

1. Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
4. Partisipasi masyarakat.

4.1.4.2 Faktor Peralatan

Faktor peralatan merupakan faktor yang dianggap penting dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintah untuk dapat memperlancar daya kerja pemerintah daerah, maka diperlukan peralatan yang

baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya

4.1.4.3 Kebijakan Keuangan Negara

Keuangan Negara merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, kebijaksanaan penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja Negara, sehingga kebijaksanaan Negara secara garis besar tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara teoritis anggaran pendapatan dan belanja negara seimbang tidak umum dikenal, karena keseimbangan dalam anggaran terdapat aliran dana disisi penerimaan yang berasal dari luar negeri.

Sumber-sumber pendapatan dari Negara tersebut dapat dibedakan menjadi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Fungsi dari penerimaan yang diperoleh dari luar negeri ini hanyalah untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan anggaran dinamis, dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah sehingga kemampuan untuk menyediakan dana untuk belanja pembangunan dapat ditingkatkan. Yang merupakan penerimaan dalam negeri dapat berupa penerimaan minyak bumi dan gas alam serta penerimaan diluar migas, adapun yang terutama bersumber dari penerimaan pajak.

Anggaran Belanja Negara terdiri dari pengeluaran rutin, selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin merupakan tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan merupakan dana pembangunan pemerintah.

Sejak tahun 1969, Indonesia menganut bentuk dan struktur anggaran pendapatan dan belanja seimbang, yang berarti seluruh pendapatan sama dengan seluruh pengeluaran. Secara teoritis anggaran pendapatan dan belanja negara seimbang berarti bahwa jumlah anggaran tergantung pada kapasitas pemerintah dalam menggali penerimaannya. Setelah itu memperkirakan penerimaan pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran pendapatan belanja seimbang tersebut berupa selisih pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dimana dapat dibiayai oleh seluruh penerimaan rutin.

4.1.4.4 Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan tatanan keseluruhan atas perangkat kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan pembelanjaan daerah (APBD). Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berbagai kebijakan keuangan daerah yang diambil, diarahkan agar pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, keuangan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Daerah

Daerah sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam usaha menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut diupayakan dengan berbagai cara, yaitu dengan berpedoman pada peraturan dan UU yang

berlaku. Adapun penerimaan daerah dapat dilihat pada pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

Penerimaan daerah dapat diperoleh dari, pertama dari sumber-sumber yang dapat dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh pendapatan dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan, dan penerimaan lainnya. Ketiga adalah berasal dari pinjaman yang diperoleh dari pemerintah daerah, baik dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah propinsi maupun yang berasal dari instansi pusat. Adapun penerimaan daerah tersebut terdiri dari (Statistik Keuangan Nasional, 2003: 10-12) :

1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu

Merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya. Sehingga dengan adanya bagian sisa hasil perhitungan tahun yang lalu akan dapat membantu anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya

2. Bagian Pendapatan Asli Daerah

Pembiayaan keuangan daerah berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sebagian kecil dari total Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), dan sumbangan serta Bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan sumber dana terbesar kedua dari penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya yang tentunya ditindak lanjuti yaitu dengan memberikan kompensasi berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pada UU No. 34 tahun 2000 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

2.1 Pajak Daerah

Adapun pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, benda bergerak atau tidak bergerak.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

2.2 Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kedua adalah Retribusi Daerah yaitu, pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

2.3 Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan salah satu sumber yang potensial untuk dikembangkan. Dimana bagian laba usaha daerah adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih bank pembangunan daerah, perusahaan daerah air minum, bagian dari laba bersih perusahaan daerah lainnya dan penyertaan modal daerah kepada perusahaan. Dan jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

2.4 Penerimaan PAD lainnya

Yang termasuk dalam rincian ini antara lain adalah hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah), dan lain-lain.

3. Bagian Dana Perimbangan

Sebelum adanya pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2001, sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah komponen dari bantuan dan subsidi pusat kepada pemerintah daerah tingkat II . Namun setelah terlaksananya Otonomi Daerah Dana Perimbangan diperuntukkan khusus bagi daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak / bukan pajak, selain itu juga terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK)

Jika dilihat dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 dijelaskan bukan pendapatan yang berasal dari pemerintah seperti yang tertera pada UU No. 5 tahun 1974, tetapi dalam UU No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa dana perimbangan, akan tetapi seharusnya pemberian pemerintah. Karena dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah merupakan bagian dari daerah setelah diambil oleh pusat seperti yang tercantum didalam pasal 80 UU No. 22 tahun 1999. Bagian Dana Perimbangan terdiri dari :

3.1 Bagi Hasil Pajak

Penerimaan bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak penghasilan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Adapun

penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan perbandingan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90 % untuk Pemerintah Daerah.

3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hasil hutan (IHH), iuran hasil pengusaha hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap pertambangan umum, iuran eksplorasi/ royalty pertambangan umum, serta pertambangan minyak dan gas bumi, dan lain-lainnya.

3.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan transfer dana yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masyarakat.

3.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan Khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum (DAU)
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

4. Bagian Penerimaan Lainnya

Adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah propinsi atau dari instansi yang lebih tinggi. Penerimaan lainnya ini terdiri dari dana darurat bencana alam, dana bantuan umum, dana bantuan khusus, penerimaan dari daerah lain dalam rangka kerja sama, dan lain-lain.

5. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah

Adalah penerimaan daerah kabupaten/ kota yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan, yang sekaligus juga dapat dipakai sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penerimaan tersebut dirinci menurut sumber pinjaman dari pemerintah pusat dan pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri dan lain-lain. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 tahun 2000 tentang pinjaman Daerah. Adapun tujuan Pemerintah Daerah melakukan pinjaman dana adalah :

- Untuk menutupi defisit keuangan jangka pendek
- Untuk membiayai kekurangan belanja rutin dan penghasilan retribusi dalam anggaran tahunan (annual budget)
- Membiayai pembelian perlengkapan dan mesin-mesin
- Membiayai pembentukan modal jangka panjang

Walaupun Dana Pinjaman ini merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengeluaran Daerah

Daerah yang telah memiliki wewenang penuh dan sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dalam hal ini pengeluaran daerah terdiri dari :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin pada dasarnya merupakan perwujudan dari pemakaian dana-dana untuk menunjang pelaksanaan pemerintah di daerah, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi. Oleh karena itu belanja pegawai menunjukkan jumlah terbesar diantara semua jenis pengeluaran rutin lainnya.

Pengeluaran rutin dapat dirinci menurut sembilan jenis belanja rutin yaitu :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Biaya Pemeliharaan
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- e. Belanja lain-lain
- f. Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga
- g. Bantuan Keuangan

h. Pengeluaran Yang tidak Termasuk Bagian Lain

i. Pengeluaran Tidak Tersangka

2. Pengeluaran Pembangunan

Adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan. Yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang diinginkan. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut telah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran Pembangunan semuanya diprogram dalam berbagai proyek disetiap sektor atau subsektor. Sektor yang mendapat prioritas utama pengeluaran di Sumatera Barat adalah sektor perhubungan dan pariwisata dalam rangka untuk memperlancar arus manusia, barang dan jasa, informasi serta untuk mendorong pemerataan hasil pembangunan, kemudian baru diikuti oleh sektor-sektor lainnya. Seperti sektor pertanian ditujukan terutama untuk kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dalam rangka mempertahankan swasembada pangan meningkatkan pendapatan pertanian dan menumbuhkan kesempatan kerja.

4.1.5 Desentralisasi Fiskal

Pada dasarnya UU No. 22 tahun 1999 juga masih menggunakan asas-asas pemerintahan dalam UU No. 5 tahun 1974. Asas-asas tersebut adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan. Perbedaannya adalah sebagai berikut (Mardiasmono, 2002: 131):

- Pemberian asas desentralisasi penuh diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

- Pelaksanaan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat di daerah.
- Pelaksanaan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa dan dari pemerintah daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan.

Asas desentralisasi penuh kepada kabupaten dan kota berimplikasi pada penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

4.1.6 Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Derajat otonomi fiskal daerah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Derajat otonomi fiskal daerah ini diukur dengan menggunakan rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin besar derajat otonomi fiskal daerah maka akan semakin besar kemampuan daerah untuk melakukan otonomi.

Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada tanggal 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan dalam rangka meningkatkan derajat otonomi fiskal daerahnya. Sehingga, semakin tinggi derajat otonomi fiskal suatu daerah akan semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

4.1.7 Tingkat Perkembangan Perekonomian

Peninjauan keadaan perekonomian suatu daerah secara makro dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ketahun merupakan tolak ukur dari pelaksanaan pembangunan daerah, selain itu PDRB juga merupakan suatu indikator untuk melihat perkembangan berbagai kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki penduduk setempat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan alat untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode disuatu daerah tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat kita ketahui jika data-data Produk domestik regional Bruto (PDRB) dikaji dari sudut perbandingan besarnya (nilai) atas dasar harga yang konstan, sedangkan struktur ekonomi dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan atas Produk Domestik Regional bruto (PDRB) dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Keseluruhan angka pada pendapatan regional dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi maupun biaya pada penilaian komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Merupakan keseluruhan angka-angka pendapatan nasional yang dinilai atas dasar harga konstan yang terjadi pada satu tahun dasar yang telah ditetapkan (1993). Penggunaan berdasarkan atas harga konstan ini, merupakan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil bukan disebabkan oleh karena perkembangan nilai yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan atas harga, melainkan disebabkan oleh adanya harga konstan.

Dengan demikian Produk Domestik regional Bruto (PDRB) tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, dimana semakin besar nilai Produk Domestik regional Bruto (PDRB) maka akan semakin maju tingkat perekonomian suatu Negara atau Daerah tersebut, dengan kata lain daerah tersebut telah berhasil dalam pelaksanaan pembangunan.

4.1.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal

4.1.8.1 PDRB riil

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Selain itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menggambarkan aktivitas perekonomian suatu daerah, semakin tinggi tingkat produktivitas daerah maka PDRB akan semakin besar. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang

digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Penggunaan PDRB riil dalam penelitian ini disebabkan karena PDRB riil menggambarkan pertumbuhan volume produksi dimana perubahan harga dipengaruhi oleh inflasi yang hilang dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Nilai PDRB akan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi perekonomian daerah, kaitannya dengan derajat otonomi fiskal suatu daerah yaitu, jika nilai PDRB meningkat maka tingkat perekonomian pun akan mengalami peningkatan sehingga kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Dengan kata lain, peningkatan PDRB menyebabkan penurunan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, maka PDRB riil berpengaruh negatif terhadap derajat otonomi fiskal suatu daerah.

4.1.8.2 Total Transfer dari Pemerintah Pusat

Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Pengaruh total transfer dari pemerintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal suatu daerah adalah: jika transfer dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah besar maka derajat otonomi fiskalnya akan rendah, sehingga dapat dikatakan daerah tersebut mengalami ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

4.1.8.3 Tabungan Pemerintah Daerah

Tabungan pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah tersebut dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya.

Semakin tinggi tabungan dari suatu daerah maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan pembangunan. Tabungan pemerintah daerah diperoleh dari selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran rutin dari daerah tersebut. Pengaruh tabungan pemerintah daerah terhadap derajat otonomi fiskal suatu daerah adalah jika tabungan suatu daerah meningkat maka akan menyebabkan peningkatan derajat otonomi fiskal. Dengan kata lain daerah tersebut akan memiliki ketergantungan fiskal yang rendah terhadap pemerintah pusat

4.1.8.4 Kebijakan Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah agar daerah tersebut dapat menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk melihat keadaan pendapatan daerah dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat digunakan variabel dummy. Sebagai variabel dummy adalah kebijakan sebelum adanya otonomi daerah (0) dan setelah otonomi daerah adalah (1) . Penggunaan variabel ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerimaan sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah diberlakukan terhadap derajat otonomi fiskal suatu daerah

4.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara, yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Berdasarkan pada

rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dirumuskan beberapa hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan data proporsi dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah sebelum otonomi lebih tinggi dari pada sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan dan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah sebelum otonomi daerah lebih rendah dari pada sesudah kebijakan otonomi
2. Diduga terdapat hubungan yang negatif dan signifikan pada variabel PDRB riil (X1) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang
3. Diduga terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada variabel total transfer dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (X2), terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang.
4. Diduga terdapat hubungan yang negatif dan signifikan pada variabel tabungan pemerintah (X3) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang
5. Diduga terdapat hubungan yang negatif dan signifikan pada variabel dummy (D), yaitu penerimaan sebelum otonomi daerah (0) dan setelah otonomi daerah (1) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang
6. Diduga upaya peningkatan potensi dan sumber daya, perbaikan tingkat perekonomian dan pembenahan manajemen penerimaan daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan fiskal dari Pemerintah Pusat.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Peneliti memilih daerah ini sebagai objek penelitian, karena dilihat propinsi ini memperoleh proporsi dana alokasi yang lebih dari Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam rangka penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah.

5.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yaitu data-data yang diambil dari buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Sebagai pendekatan masalah maka, data yang digunakan adalah data Time Series yang memiliki runtun waktu tahunan yaitu dari tahun 1989 hingga tahun 2002/2003. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa Penerimaan Asli Daerah (PAD), Tabungan Pemerintah Daerah, Bantuan atau Subsidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Produk domestik Regional Bruto (PDRB). Metode pengumpulan data sangatlah penting. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang akan digunakan harus direncanakan dengan metode pustaka sehingga akan memudahkan penelitian, serta pengefisienan waktu, biaya dan tenaga.

Adapun sumber data diperoleh dari :

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang
2. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Propinsi Sumatera Barat
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang

5.3 Metode Analisis Data

5.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur, atau menggunakan analisa data yang sifatnya menguraikan dalam kalimat.

5.3.2 Analisis Kuantitatif

Merupakan metode analisis yang menggunakan rumus-rumus atau teknik perhitungan tertentu yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis :

5.3.2.1 Ketergantungan Daerah Terhadap Pemerintah Pusat

Untuk pengujian hipotesa ini dengan membandingkan antara pendapatan daerah Kota Padang sendiri dengan Total Pendapatan Daerah Kota Padang.

(Susanto ,2001:16)

$$Df = \frac{PDS}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

Df = Ketergantungan Fiskal Daerah Terhadap Pusat

PDS = Pendapatan Daerah Sendiri (PAD + PPD)

TPD = Total Pendapatan Daerah (PAD + PPD + Bantuan)

Jika dari perhitungan tersebut diperoleh hasilnya berada diatas 50 % maka dinyatakan bahwa daerah memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Jika hasil yang diperoleh berada dibawah 50 % maka dinyatakan bahwa daerah memiliki ketergantungan fiskal yang rendah terhadap pemerintah pusat sehingga bisa dikatakan daerah tersebut semakin mandiri.

5.3.2.2 Derajat Otonomi Fiskal

Untuk menganalisis tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kota Padang terhadap pemerintah pusat digunakan fungsi analisis sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

Untuk menguji hipotesis maka bentuk regresi yang digunakan dalam analisis ini adalah bentuk regresi linier yang didasarkan pada persebaran (*scatter plot*) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Secara umum bentuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 - \beta_4 D + e$$

Keterangan :

Y = Derajat Otonomi Fiskal , dengan menggunakan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD (%)

β_0 = Konstanta

X_1 = PDRB riil (Juta Rp)

X_2 = Total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD (Rp 000)

X_3 = Tabungan pemerintah untuk belanja pembangunan (Rp 000)

D = Variabel dummy

D = 0, sebelum otonomi daerah

D = 1, sesudah otonomi daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi dari X_1, X_2, X_3, D

e = Faktor pengganggu

5.3.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk mengestimasi masing-masing parameter diatas, maka dapat dilakukan beberapa pengujian yaitu

a. Uji F (Koefisien Regresi secara Serempak)

Uji F yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada derajat kebebasan tertentu. Hipotesa yang diajukan adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$; tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$; ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak berarti secara bersama-sama *variabel independen* secara signifikan mempengaruhi *variabel dependen*.

Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima berarti secara bersama-sama *variabel independen* secara signifikan tidak mempengaruhi *variabel dependen*.

b. Uji t (Pengujian secara Parsial)

Pengujian secara parsial dimaksudkan dengan menggunakan uji t statistik satu sisi terhadap masing-masing variabel bebas, dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel – variabel penjelas terhadap variabel tidak bebas secara parsial.

Hipotesanya adalah :

$H_0 : \beta_i = 0$, Dapat diasumsikan bahwa variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_i > 0$, Dapat diasumsikan bahwa variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependennya

Dengan uji t diasumsikan :

- Apabila digunakan uji statistik satu arah, maka :

Jika $t\text{ hitung} \leq t(\alpha, n-k)$, maka akan terima H_0 dan tolak H_a

Jika $t\text{ hitung} \geq t(\alpha, n-k)$, maka tolak H_0 dan terima H_a

- Apabila digunakan uji statistik dua arah, maka :

Jika $t\text{ hitung} \leq t(-\frac{1}{2}\alpha, n-k)$, maka akan terima H_0 dan tolak H_a

Jika $t \text{ hitung} \geq t(-\frac{1}{2} \alpha, n-k)$, maka tolak H_0 dan terima H_a

Jika tolak H_0 berarti variabel independen yang bersangkutan secara signifikan akan berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Bila H_0 diterima berarti variabel independen tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dimaksudkan untuk melihat kebaikan suatu garis regresi yang dicocokkan terhadap sekumpulan data koefisien determinasi majemuk (*Multiple Coefficient of Determinant*) merupakan perkisaran yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Secara umum, R^2 mengukur proporsi atau prosentase total variasi dalam y yang dijelaskan oleh model regresi

R^2 merupakan besaran positif, batasnya adalah ($0 < R^2 < 1$), jika besarnya adalah 1 dapat diartikan suatu kecocokan sempurna, jika R^2 nilainya adalah 0 berarti tidak ada hubungan antara *independent variable* dengan *dependent variable* (Damodar Gujarati, 1997 : 153).

Untuk memperoleh nilai R^2 dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \qquad R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana : ESS adalah *Explained Sum of Squares* yaitu variasi Y yang dapat diterangkan oleh X.

TSS adalah *Total Sum of Square* yaitu ukuran dari total perubahan (variasi) Y atau variasi yang ingin dijelaskan.

d. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini adalah untuk melihat apakah model yang diteliti terkena penyimpangan klasik atau tidak. Maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan klasik tersebut harus dilakukan asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan metode OLS adalah asumsi klasik sebagai berikut :

- E_i merupakan variabel random dan mengikuti distribusi normal
- Varian bersyarat dari e_i adalah konstan atau homoskedastisitas
- Tidak ada autokorelasi
- Tidak ada multikolinear

Dari asumsi tersebut cukup menguji tiga asumsi diantaranya yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Multikolinearitas

Pengujian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji keterkaitan antara variabel independen, dilakukan dengan melihat R^2 , nilai t, nilai F. Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih

variabel independen dinyatakan sebagai kombinasi linear variabel independen lainnya. Jika ditemukan nilai $r^2 > R^2$ pada metode penelitian ini maka model persamaan tersebut ada multikolinear, dan apabila R^2 lebih besar dari semua r^2 maka tidak ada multikolinier. Maka untuk menguji multikolinieritas ini digunakan metode *Klein's Rule of Thumb*, yaitu dengan menguji masing-masing variabel independen.

2. Heteroskedastisitas

Dalam pengujian terhadap asumsi klasik dari model regresi linear klasik dinyatakan bahwa gangguan U_i semuanya mempunyai varian yang sama, jika asumsi ini tidak terpenuhi maka akan terjadi heteroskedastisitas. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *uji white* yaitu dengan membandingkan antara nilai $df \chi^2$ -tabel dengan $df \chi^2$ -hitung.

3. Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota rangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Pengujian terhadap gejala ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *Durbin Watson (DW)*.

Jika korelasi serial dalam penaksiran OLS yang dihitung secara konvensional dan variannya diabaikan maka penaksiran tidak akan efisien.

Langkah Pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung perkiraan kesalahan pengganggu $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$ menghitung d dengan melihat hasil perhitungan pada komputer
- b. Mencari nilai kritis d_l dan d_u dari tabel N dan banyaknya variabel bebas X tertentu
- c. Jika hipotesa nol = H_0 = Tidak ada korelasi serial positif, apabila :
 - $d < d_l$, tolak H_0
 - $d < d_u$, tolak H_0
 - $d_l < d < 4 - d_u$, tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*)
- d. Jika hipotesa nol = H_0 = tidak ada korelasi serial negatif, apabila :
 - $d > 4 - d_l$, tolak H_0
 - $d < 4 - d_u$, terima H_0
 - $d_l < d < 4 - d_l$, tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*)
- e. Jika H_0 2 arah yaitu jika tidak ada korelasi serial positif dan negatif maka:
 - $d < d_l$, tolak H_0
 - $d > 4 - d_l$, terima H_0
 - $d_u < d < 4 - d_u$, terima H_0
 - $d_l < d < d_u$ atau $4 - d_u < d < 4 - d_l$, tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*)

BAB VI

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dianalisis mengenai pengaruh variabel transfer dana dari pemerintah pusat, variabel tabungan pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dan variabel dummy (D) terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang selama kurun waktu 1989 – 2003. Maka untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut maka dilakukan analisis regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square).

6.1 Deskripsi Data

Analisis deskripsi merupakan suatu metode analisis data dengan pendeskripsian faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sebagai pendukung analisis kuantitatif.

Otonomi fiskal daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah dengan mengukur derajat otonomi fiskal yaitu dengan *administrative independency ratio* adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Transfer dana dari pemerintah terbesar akan digunakan sebagai variabel independen. Total transfer dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah akan menunjukkan seberapa besar transfer dari pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan keinginan pemerintah daerah

tersebut. Data total transfer dari pemerintah pusat ini diperoleh dari Kota Padang Dalam Angka berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan ribu Rupiah selama kurun waktu 1989 – 2003. Data total transfer ini merupakan variabel independen

Tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja pembangunan di daerah tersebut. Data ini merupakan data variabel independen, data tabungan ini diperoleh dari perbandingan antara pendapatan asli dari daerah tersebut dengan pengeluaran rutin, sehingga dapat digunakan untuk biaya pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dapat menunjukkan besarnya perkembangan ekonomi suatu daerah yaitu ditunjukkan dengan semakin tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil daerah tersebut. Data ini merupakan variabel independen yang diperoleh dengan menghitung sembilan sektor pendukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kotamadya Padang menurut lapangan usaha yang telah disesuaikan dengan tahun dasarnya ke dalam tahun dasar 1993.

6.2 Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang berdasarkan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini (Lampiran II). Maka dilihat perbandingan proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak yang diserahkan pada Pemerintah Daerah, Bantuan dan Subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah dengan cara membandingkan masing-masing faktor tersebut dengan Total

Penerimaan Daerah maka dapat dikatakan bahwa Kota Padang memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal yang rendah terhadap Pemerintah Pusat, karena proporsi bantuan terhadap total penerimaan daerah kurang dari 50 % (lihat pada lampiran III).

Tingkat Desentralisasi Fiskal ditinjau dari proporsi Bantuan ataupun Sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Total Penerimaan Daerah (Dapat disebut sebagai APBD) tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi antara sebelum Otonomi Daerah dengan setelah Otonomi Daerah (Tahun 2001). Tahun 1992 proporsi bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah adalah sebesar 18 % namun pada tahun 1994 hingga tahun 1999 proporsi bantuan terhadap total penerimaan daerah mengalami penurunan yaitu berkisar antara 17 % - 15 %, pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 19 % dan setelah diterapkannya Otonomi Daerah pada tahun 2001 – 2003 proporsi bantuan terhadap total penerimaan daerah mencapai 21 % per tahun.

Proporsi Pajak Pemerintah Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah antara sebelum Otonomi Daerah dan setelah Otonomi Daerah tidak memiliki peningkatan yang cukup tinggi mulai tahun 1989 – 1997 yaitu sebesar 16 % - 19% (lampiran II). Dengan mulai dicanangkannya Otonomi Daerah proporsi pajak terhadap total penerimaan daerah semakin meningkat, tahun 2001-2001 mencapai 28 % namun pada tahun 2003 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 27 % hal ini disebabkan karena tidak adanya Iuran hasil Hutan (IHH) yang biasanya menjadi salah satu pemasukan dari Pemerintah Kota Padang setiap tahun.

6.3 Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap pemerintah Pusat

Dengan menggunakan analisis ketergantungan fiskal yaitu dengan membandingkan Pendapatan Daerah Sendiri dengan Total Penerimaan Daerah (TPD dapat disebut juga sebagai Anggaran penerimaan Belanja Daerah/APBD), dapat dikatakan bahwa Kota Padang tidak memiliki ketergantungan fiskal terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan membandingkan antara Pendapatan Daerah Sendiri (PAD + Pajak Pemerintah Daerah) dengan Total Penerimaan Daerah per tahun mulai dari tahun 1989 hingga tahun 2003 terlihat bahwa tingkat ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat rendah. Tahun 1989 total pendapatan daerah sendiri terhadap total penerimaan daerah mencapai 87 % terus mengalami penurunan hingga 78% pada tahun 2003 disebabkan karena pada tahun ini telah terlaksananya Otonomi Daerah. Sehingga dengan adanya penurunan tersebut akan membawa dampak yang baik dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang sebenarnya. (Lampiran IV)

6.4 Analisis Hasil Regresi

Penelitian ini adalah merupakan model regresi linier serta menggunakan perangkat Eviews. Adapun hal ini dilakukan adalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan regresi. Hasil dari regresi ini akan mendapatkan persamaan garis regresi yang diperoleh dari rangkaian data-data penelitian, selain itu hasil regresi

menggunakan OLS dengan perangkat Eviews maka akan menghasilkan olahan data seperti tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Hasil Regresi Antara Variabel Dependen Dengan Variabel
Independen

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-statistik
Konstanta	0.244942	0.012701	19.28495
X1	-4.22E-10	1.00E-10	-4.206783
X2	-8.61E-12	5.10E-12	-1.687009
X3	5.68E-12	2.01E-12	2.832963
D	-0.074147	0.035320	-2.099298

Sumber : Olahan data Eviews

R-Squared = 0.882007

Adjusted R-Squared = 0.834809

F-Statistic = 18,68766

Durbin-Watson stat = 1.583832

Dari hasil pengujian diatas, maka dapat dihasilkan persamaan garis regresi sbb :

$$Y = \beta_0 - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 - \beta_4 D + e$$

$$Y = 0,244942 - 4,22E-10X_1 - 8,61E-12X_2 + 5,68E-12X_3 - 0,074147D$$

6.5 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara individual.

6.5.1 Uji F-Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean yang timbul. Dimana perbedaan tersebut hanya secara kebetulan atau karena faktor lain yang benar-benar berarti atau signifikan, untuk mencari F-Tabel dapat dihitung :

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= F(k-1, n-k) \\ &= F(\alpha = 5\%, k-1, n-k) \\ &= F(0.05, 3, 11) \\ &= 3.59 \end{aligned}$$

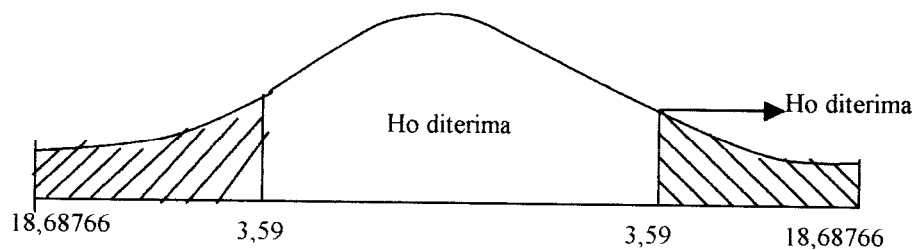
Sementara hasil regresi diperoleh bahwa F-statistik sebesar 18,68766 yang berarti bahwa F-statistik > F-tabel, maka H_0 ditolak (signifikan) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Dengan demikian dapat diperoleh hipotesis pengujiannya adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = D = 0$; berarti secara bersama-sama variabel-variabel X_1 (PDRB riil), X_2 (total transfer dari pemerintah pusat), X_3 (tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) dan D (dummy) tidak mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah.

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq D \neq 0$; berarti secara bersama-sama variabel-variabel X_1 (PDRB riil), X_2 (total transfer dari pemerintah pusat), X_3 (tabungan pemerintah terhadap untuk pembangunan) mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah

Gambar 6.1
Uji F Statistik



6.5.2 Uji t - statistik

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t-statistik yang telah diperoleh dari hasil regresi dengan t-tabel, dengan tingkat $\alpha = 5$

Tabel 6.2
Pengujian Variabel Independen dengan Uji t-Statistik

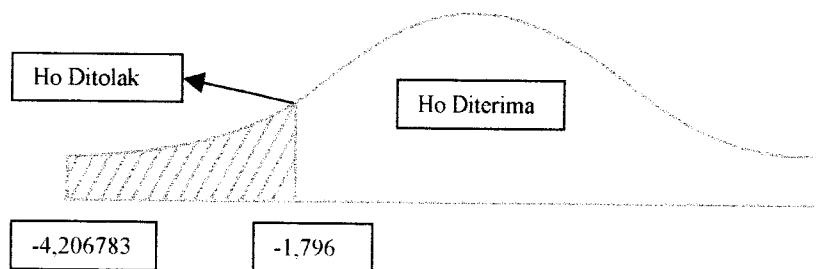
Variabel	t-statistik	t-tabel df (n-k)	α	Keterangan
X_1	-4.206783	-1,796	5%	Signifikan
X_2	-1.687009	1,796	5%	Tidak signifikan
X_3	2.832963	-1,796	5%	Tidak signifikan
D	-2.099298	-1,796	5%	Signifikan

Sumber : Olahan data Eviews

6.5.2.1 Uji Satu Sisi Parameter Variabel PDRB riil (β_1)

Untuk variabel PDRB riil (X_1) t -hitung = $-4,206783$, t -tabel = $-1,796$, $df = 11$, $\alpha = 5\%$, karena t -hitung $<$ t -tabel, jadi $-4,239284 < -1,796$, pada sisi negatif maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, maka terdapat hubungan yang negatif dan signifikan pada PDRB riil. Sehingga hipotesis yang menyatakan variabel PDRB riil berpengaruh negatif dan signifikan terbukti

Gambar 6.2
Uji Satu Sisi Parameter Variabel PDRB Riil



6.5.2.2 Uji Satu Sisi Parameter Variabel Transfer Dari Pemerintah Pusat (β_2)

Untuk variabel transfer Pemerintah Pusat terhadap Daerah (X_2) t -hitung = $-1,687009$, t -tabel = $1,796$, $df = 11$, $\alpha = 5\%$, karena t -hitung $<$ t -tabel, $-1,687009 < 1,796$, pada sisi positif maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan derajat desentralisasi fiskal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel transfer dari pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan tidak terbukti.

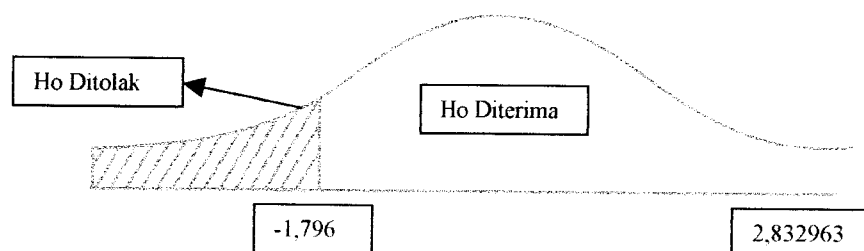
Gambar 6.3
Uji Satu Sisi Parameter Variabel Transfer Dari Pemerintah Pusat



6.5.2.3 Uji Satu Sisi Parameter Variabel Tabungan Pemerintah Daerah (β_3)

Uji variabel tabungan pemerintah daerah (X3) t -hitung = 2,832963, t -tabel = -1,796, $df = 11$, $\alpha = 5\%$, karena t -hitung > t -tabel, $2,832963 > -1,796$, pada sisi negatif maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tabungan pemerintah daerah dengan derajat desentralisasi fiskal daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tabungan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan tidak terbukti.

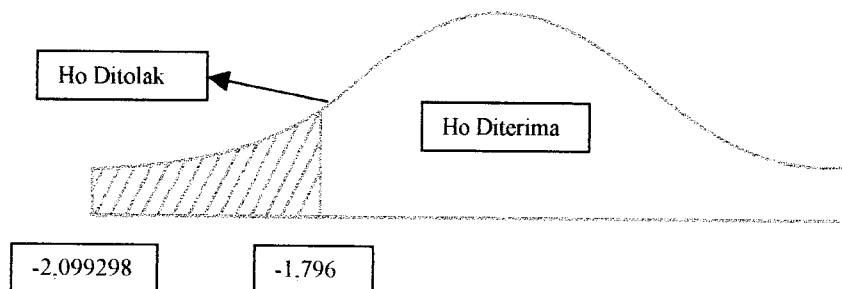
Gambar 6.4
Uji Satu Sisi Parameter Variabel Tabungan Pemerintah Daerah



6.5.2.4 Uji Satu Sisi Parameter Variabel Dummy (β_4)

Untuk variabel dummy (D) t -hitung = $-2,099298$, t -tabel = $1,796$, $df = 11$, $\alpha = 5\%$, karena t -hitung < t -tabel, $-2,099298 < -1,796$, pada sisi negatif maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti tidak terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara variabel dummy dengan derajat desentralisasi fiskal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel dummy berpengaruh negatif dan signifikan terbukti.

Gambar 6.5
Uji Satu Sisi Parameter Variabel Dummy



6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur ketepatan suatu regresi terhadap hasil observasi digunakan analisis koefisien determinasi (R^2). Hasil perhitungan dengan menggunakan perangkat Eviews diperoleh R-squared sebesar 0.882007 yang berarti bahwa 88% variasi variabel derajat otonomi fiskal daerah mampu dijelaskan oleh variasi

variabel-variabel independen (X_1, X_2, X_3, D) dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model

6.5.4 Interpretasi Masing-masing Variabel Independen

Dari hasil regresi pada tabel 6.1 diperoleh persamaan regresi dibawah ini :

$$Y = 0,244942 - 4,22E-10X_1 - 8,61E-12X_2 + 5,68E-12X_3 - 0,074147D$$

Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. 0,244942, artinya dengan diberlakukannya otonomi daerah maka PDRB riil, total transfer dari pemerintah pusat, tabungan pemerintah daerah, variabel sebelum dan sesudah otonomi daerah (dummy) akan mempengaruhi derajat otonomi fiskal Kota Padang sebesar 0,244942 persen.
2. Koefisien $X_1 = - 0.0000000422$, artinya jika PDRB riil naik 1 Juta Rupiah maka derajat otonomi fiskal Kota Padang akan turun sebesar 0.0000000422 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
3. Koefisien $X_2 = - 0.00000000861$, artinya jika transfer dari pemerintah pusat naik 1 Ribu Rupiah maka derajat otonomi fiskal Kota Padang akan turun sebesar 0.00000000861 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
4. Koefisien $X_3 = 0.00000000568$, artinya jika tabungan pemerintah daerah naik sebesar 1 Ribu Rupiah maka derajat otonomi fiskal Kota Padang akan turun

sebesar 0.000000000568 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

5. Koefisien D = - 0,074147, artinya jika kebijakan otonomi daerah diberlakukan maka derajat otonomi fiskal Kota Padang adalah sebesar 0.074147 persen.

6.5.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi klasik ini dapat dilakukan dengan beberapa pengujian untuk mengestimasi variabel-variabel yang digunakan dalam model.

6.5.5.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi yang digunakan. Untuk menguji multikolinieritas ini digunakan metode *Klein's Rule Of Thumb*. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3
Hasil Uji Antara Variabel Independen

no	Variabel Independen	r^2	</>	R^2	Hasil
1	$X_1 - X_2$	0,479944	<	0.882007	Tdk Ada Multiko
2	$X_1 - X_3$	0,590271	<	0.882007	Tdk Ada Multiko
3	$X_1 - D$	0,287156	<	0.882007	Tdk Ada Multiko
4	$X_2 - X_3$	0,863748	<	0.882007	Tdk Ada Multiko
5	$X_2 - D$	0,866166	<	0.882007	Tdk Ada Multiko
6	$X_3 - D$	0,749049	<	0.882007	Tdk Ada Multiko

Sumber : Olahan data Eviews.

Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji masing-masing variabel independen untuk mengetahui seberapa jauh korelasi (r^2), kemudian dibandingkan dengan R^2 pada regresi awal. Jika $r^2 < R^2$, maka dapat dikatakan dalam model tidak terdapat multikolinieritas. Untuk hasil uji korelasi dapat dilihat pada halaman lampiran IX sampai lampiran XI.

Dari hasil uji variabel independen maupun uji korelasi dengan menggunakan metode klein dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat hubungan linier antara variabel independennya, atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinieritas.

5.5.2.2 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel gangguan mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka akan digunakan *Uji White* dengan cara terlebih dahulu menentukan df χ^2 -hitung. Selanjutnya nilai df χ^2 -hitung ini dibandingkan dengan nilai df χ^2 - tabelnya dengan $\alpha = 5\% = 15,5073$ untuk df = 8). Oleh karena χ^2 - hitung (nilai Obs* R-squared) $< \chi^2$ - tabel : $9,133402 < 15,5073$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa model empirik bebas dari masalah heteroskedastisitas diterima. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Uji White Heteroskedastisitas No Cross Term Maupun Uji White Heteroskedastisitas Cross Term.

5.5.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota, dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti data runtun waktu atau time series. Berdasarkan hasil perhitungan komputer dengan menggunakan metode penyesuaian parsial yang memuat kelambanan dari variabel dependen sehingga menghasilkan nilai dari Durbin-Witson Statistik sebesar 1,583832 pada $\alpha = 5 \%$

Nilai tabel DW Statistik untuk $d_l(\alpha, k, n) = (0.05, 4, 15) = 0.69$

Nilai tabel DW untuk $d_u(\alpha, k, n) = (0.05, 4, 15) = 1.97$

Keterangan :

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah pengamatan

Hipotesisnya :

H_0 = Tidak ada autokorelasi (+)

H_a = Tidak ada autokorelasi (-)

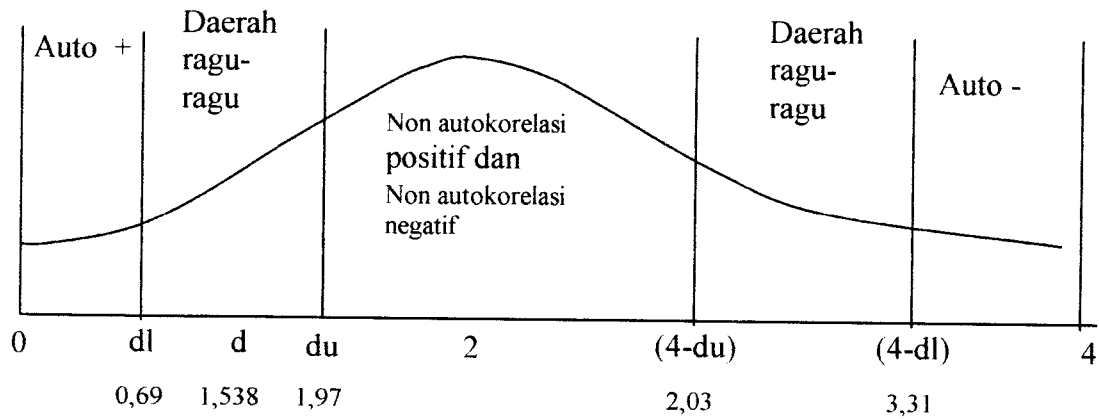
Dimana :

H_0 dan H_a berada didaerah H_0 diterima $d < d_l$ atau $4-d_l < d < 4$

H_0 dan H_a berada didaerah H_0 diterima $d_u < d < 4 - d_l$

H_0 dan H_a berada didaerah ketidak pastian jika $d_l \leq d \leq d_u$ atau $4-d_u \leq d \leq 4-d_l$

Gambar 6.6
Pengujian Autokorelasi



Maka dari hasil perhitungan dapat diperoleh kesimpulan bahwa analisis dibawah ini tidak terdapat masalah autokorelasi positif maupun masalah autokorelasi negatif. Melihat Dwnya nilai d terletak pada daerah ragu-ragu positif atau berada didaerah ketidak pastian positif, terletak antara $d_l \leq d \leq d_u$ dengan kata lain DW sebesar 1.583832 berada diantara $0,69 \leq 1.583832 \leq 1,97$, walaupun berada pada daerah ketidak pastian tetapi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis ini tidak terdapat autokorelasi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak yang diserahkan pada Pemerintah Daerah, Bantuan dan Subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah dengan cara membandingkan masing masing faktor tersebut dengan Total Penerimaan Daerah maka dapat dikatakan bahwa Kota Padang memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal yang agak rendah terhadap Pemerintah Pusat (Lampiran III) Hal ini berarti dalam melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Padang mempunyai keleluasaan dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan daerahnya.
2. PDRB riil (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal Kota Padang. Berarti pertumbuhan PDRB Kota Padang memberikan dampak yang baik terhadap derajat otonomi fiskal, namun pemerintah daerah harus tetap menggali sektor-sektor yang berpotensi dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Hipotesis yang menyatakan bahwa total transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajat

otonomi fiskal daerah tidak terbukti, karena bantuan dari pemerintah pusat terhadap Kota Padang setelah dilakukan penelitian tidaklah tinggi.

4. Hipotesis yang menyatakan bahwa tabungan pemerintah Kota Padang (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang, tidak terbukti. Karena tabungan Pemerintah Kota Padang setelah dilakukan penelitian cukup besar. Artinya tabungan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan dari daerah tersebut untuk membiayai belanja pembangunan daerahnya. Semakin besar tabungan Pemerintah maka akan semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat
5. Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel berupa pelaksanaan otonomi daerah (Dummy) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap derajat otonomi fiskal Kota Padang terbukti. Artinya variabel dummy menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
6. Dari hasil pengolahan data time series kurun waktu 1989 – 2003 maka derajat otonomi fiskal Kota Padang dapat dikatakan bahwa variabel dependennya secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel independen, berarti secara bersama-sama variabel-variabel X_1 (PDRB riil), X_2 (total transfer dari pemerintah pusat), X_3 (tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) tidak mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah.

7. Dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

7.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dicermati oleh pemerintah daerah Padang :

1. Perlu adanya upaya peningkatan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Penerimaan Daerah untuk mencegah terjadinya Desentralisasi Fiskal. Maka pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi keuangan daerah, berikut kendala-kendala peningkatan keuangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Upaya untuk mempertahankan tingkat keseimbangan fiskal yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang harus tetap dilakukan dengan cara melakukan peningkatan terhadap pendapatan daerah sendiri .
3. Dengan diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat maka usaha-usaha yang dapat mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah harus tetap ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembenahan manajemen penerimaan daerah dan penggalian potensi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, 1993, Metodologi Penelitian Ekonomi , UI Press, Jakarta
- Aroef, Matthias, 1991, Ekonometrika Terapan 2, Tarsito, Bandung
- Arsyad, Lincolin, 1997, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang , BPS Kota Padang, Padang, Berbagai Edisi
- _____ , 2003, Statistik Keuangan Nasional , BPS Jakarta, Jakarta
- _____ , Sumatera Barat Dalam Angka, BPS Propinsi Sumatera Barat, Padang, Berbagai Edisi
- Bhinadi, Ardhito, 1997, "Hubungan Fiskal Antara Pusat dan Daerah" , 4 Desember 1997, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 2, FE UGM, Yogyakarta
- Davey, Kenneth, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia (Terjemahan Amarullah), UI Press, Jakarta
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Devas, Nick, dkk, 2002 , Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia , UI Press, Jakarta
- Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian, 2004, Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran, UII Press, Yogyakarta
- Elmi, Bachrul, 2002 , Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Indonesia , UI Press, Jakarta
- Fachrully Rahemayati, 2000, "Ketergantungan Fiskal di Kabupatern Sleman". Karya tulis Ilmiah PPE FE UII, Yogyakarta
- Gujarati, Damodar, 1997, Ekonometrika Dasar (Terjemahan), Erlangga, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi dan Pembangunan daerah , Andi Yogyakarta, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ,BPFE , Yogyakarta

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta
- _____, 2000, Pemulihan Ekonomi Rakyat Menuju Kemandirian Masyarakat Desa, Aditya Media/YAE, Yogyakarta
- Mubyarto, 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca krisis Ekonomi, BPF, Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia, 2000, Undang-Undang Otonomi Daerah beserta Juklak, Akola, Jakarta
- Prakoso, B Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta
- Sudantoko, Djoko, 2003, Dilema Otonomi Daerah, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Susanto, Sudono. 2001, “_Analisis Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 – 1998/1999”_, Skripsi Sarjana Ekonomi FE UII, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta
- Wijaya, Purnama, 2001, “Otonomi Fiskal Daerah Tingkat II OKU dan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumsel”, Skripsi, Sarjana Ekonomi FE UII, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta
- Yulianti, Asnafiah, 2001. “Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menyongsong Otonomi Daerah” Studi kasus , Ekonomi Bisnis Indonesia, Volume 2 April- Juli 2001 UMY, Yogyakarta
- Yusrizal, 1999. “Peranan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap “, Skripsi Sarjana Ekonomi FE UII, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta

LAMPIRAN

Data Yang Digunakan Dalam Analisis

Keterangan :

Y = Derajat Otonomi Fiskal , dengan menggunakan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD (%)

X₁ = PDRB riil (Juta Rp)

X₂ = Total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD (Rp 000)

X₃ = Tabungan pemerintah untuk belanja pembangunan (Rp 000)

D = Variabel dummy

D = 0, sebelum otonomi daerah

D = 1, sesudah otonomi daerah

Tahun	Y	D	X3	X2	X1
1989	0.273317	0	7160027225	1346027400	743958,43
1990	0.226683	0	7621787620	1848972200	840558,34
1991	0.221434	0	8670404002	2317889400	893777,79
1992	0.211586	0	9702831000	2784240500	1271600,00
1993	0.194725	0	9615107684	3100969200	1817542,00
1994	0.204782	0	11373694791	3288842300	1979343,00
1995	0.192736	0	12863001960	3585382600	2157831,00
1996	0.205543	0	15807836712	4039957300	2361973,30
1997	0.206299	0	18962741913	4502752700	2510421,62
1998	0.230840	0	24202854769	5918809500	2319689,52
1999	0.229207	0	26466778600	7643057400	2359246,76
2000	0.249249	0	30908064853	9573403500	2467475,33
2001	0.141256	1	37102144806	16437357600	2562850,00
2002	0.155358	1	55033082000	23383000000	2682460,00
2003	0.157559	1	58238690000	26554000000	2816070,00

**DATA UNTUK MELIHAT DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL
(Rp 000)**

TAHUN	PAD	PPD	BANTUAN	TPD
1989	7050488025	2080035000	1346027400	10476550425
1990	7611877190	2088806230	1848972200	11549655620
1991	8883180002	2206313000	2317889400	13407382402
1992	9954317000	2621359000	2784240500	15359916500
1993	10432937259	2683079025	3100969200	16216985484
1994	12147621062	3042265229	3288842300	18478728591
1995	13426572722	3764005838	3585382600	20775961160
1996	16045102148	4576192464	4039957300	24661251912
1997	18732030103	5131505210	4502752700	28366288013
1998	21762071123	9348769746	5918809500	37029650369
1999	26449352444	9104883656	7643057400	43197293500
2000	29073627166	10371364187	9573403500	49018394853
2001	39351199211	22296157795	16437357600	78084714606
2002	52951303868	31006433809	23383000000	1.07341E+11
2003	62516831214	34465149996	26554000000	1.23536E+11

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pajak Penerimaan Daerah

B : Bantuan atau subsidi yang diperoleh dari pemerintah pusat

TPD : Total Penerimaan Daerah (PAD + PPD + B)

Tingkat Desentralisasi Fiskal

TAHUN	PAD/TPD	PPD/TPD	BANTUAN/TPD
1989	0.672978007	0.198541974	0.128480019
1990	0.659056637	0.180854417	0.160088946
1991	0.66255886	0.164559564	0.172881576
1992	0.648071036	0.170662321	0.181266643
1993	0.643333946	0.165448691	0.191217363
1994	0.65738403	0.164636069	0.177979902
1995	0.64625519	0.181171201	0.172573609
1996	0.650619936	0.18556205	0.163818014
1997	0.660362403	0.180901541	0.158736057
1998	0.58769313	0.252467135	0.159839735
1999	0.612291889	0.210774401	0.17693371
2000	0.593116671	0.211581065	0.195302264
2001	0.503955216	0.285538058	0.210506726
2002	0.493301099	0.288859891	0.217839010
2003	0.506061721	0.278988758	0.214949521

DATA UNTUK MELIHAT KETERGANTUNGAN THDP PEMERINTAH PUSAT				
(Rp. 000)				
TAHUN	PAD	PPD	TPD	Df (%)
1989	7050488025	2080035000	10476550425	0.871519981
1990	7611877190	2088806230	11549655620	0.839911054
1991	8883180002	2206313000	13407382402	0.827118424
1992	9954317000	2621359000	15359916500	0.818733357
1993	10432937259	2683079025	16216985484	0.808782637
1994	12147621062	3042265229	18478728591	0.822020098
1995	13426572722	3764005838	20775961160	0.827426391
1996	16045102148	4576192464	24661251912	0.836181986
1997	18732030103	5131505210	28366288013	0.841263943
1998	21762071123	9348769746	37029650369	0.840160265
1999	26449352444	9104883656	43197293500	0.82306629
2000	29073627166	10371364187	49018394853	0.804697736
2001	39351199211	22296157795	78084714606	0.789493274
2002	52951303868	31006433809	1.07341E+11	0.782159079
2003	62516831214	34465149996	1.23536E+11	0.785050359

Dengan Menggunakan Formula :

$$Df = \frac{PDS}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

Df = Ketergantungan Fiskal Daerah Terhadap Pusat

PDS = Pendapatan Daerah Sendiri (PAD + PPD)

TPD = Total Pendapatan Daerah (PAD + PPD + Bantuan)

Hasil Regresi

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:34				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.244942	0.012701	19.28495	0.0000
X1	-4.22E-10	1.00E-10	-4.206783	0.0018
X2	-8.61E-12	5.10E-12	-1.687009	0.1225
X3	5.68E-12	2.01E-12	2.832963	0.0178
X4	-0.074147	0.035320	-2.099298	0.0622
R-squared	0.882007	Mean dependent var		0.206705
Adjusted R-squared	0.834809	S.D. dependent var		0.035512
S.E. of regression	0.014433	Akaike info criterion		-5.377361
Sum squared resid	0.002083	Schwarz criterion		-5.141345
Log likelihood	45.33021	F-statistic		18.68766
Durbin-Watson stat	1.583832	Prob(F-statistic)		0.000124

Plot Hasil Regresi

1989	0.27332	0.24257	0.03075	. . *
1990	0.22668	0.23680	-0.01011	. * .
1991	0.22143	0.23647	-0.01503	* .
1992	0.21159	0.22247	-0.01088	. * .
1993	0.19473	0.19603	-0.00130	. * .
1994	0.20478	0.19774	0.00704	. * .
1995	0.19274	0.19608	-0.00334	. * .
1996	0.20554	0.20445	0.00109	. * .
1997	0.20630	0.21656	-0.01026	. * .
1998	0.23084	0.23345	-0.00261	. * .
1999	0.22921	0.23002	-0.00082	. * .
2000	0.24925	0.23376	0.01549	. *
2001	0.14126	0.13224	0.00901	. *
2002	0.15536	0.16860	-0.01325	. * .
2003	0.15756	0.15333	0.00423	. *

Hasil Uji Heteroskedastisitas, Menggunakan Uji White No Cross Term

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	1.556848	Probability	0.286746	
Obs*R-squared	9.133402	Probability	0.243220	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:38				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002456	0.001160	2.116717	0.0721
X1	-2.60E-11	1.37E-11	-1.895207	0.0999
X1^2	8.16E-20	4.93E-20	1.652974	0.1423
X2	4.62E-14	1.75E-13	0.263482	0.7998
X2^2	-5.72E-24	5.84E-24	-0.979567	0.3599
X3	-7.17E-14	9.17E-14	-0.782728	0.4594
X3^2	1.51E-24	1.46E-24	1.033444	0.3358
D	0.000283	0.000660	0.428979	0.6808
R-squared	0.608893	Mean dependent var	0.000139	
Adjusted R-squared	0.217787	S.D. dependent var	0.000237	
S.E. of regression	0.000210	Akaike info criterion	-13.79438	
Sum squared resid	3.09E-07	Schwarz criterion	-13.41675	
Log likelihood	111.4578	F-statistic	1.556848	
Durbin-Watson stat	2.189725	Prob(F-statistic)	0.286746	

Plot Uji Heteroskedastisitas, Menggunakan Uji White No Cross Term

1989	0.27332	0.24257	0.03075	. . *
1990	0.22668	0.23680	-0.01011	. * .
1991	0.22143	0.23647	-0.01503	* .
1992	0.21159	0.22247	-0.01088	. * .
1993	0.19473	0.19603	-0.00130	. * .
1994	0.20478	0.19774	0.00704	. *
1995	0.19274	0.19608	-0.00334	. * .
1996	0.20554	0.20445	0.00109	. * .
1997	0.20630	0.21656	-0.01026	. * .
1998	0.23084	0.23345	-0.00261	. * .
1999	0.22921	0.23002	-0.00082	. * .
2000	0.24925	0.23376	0.01549	. *
2001	0.14126	0.13224	0.00901	. *
2002	0.15536	0.16860	-0.01325	. * .
2003	0.15756	0.15333	0.00423	. *

Hasil Uji Heteroskedastisitas, menggunakan Uji White Cross Term

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	314.7434	Probability	0.003171	
Obs*R-squared	14.99206	Probability	0.241871	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:40				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005010	0.000273	-18.33198	0.0030
X1	3.07E-12	2.33E-12	1.318965	0.3179
X1^2	1.97E-21	9.95E-21	0.198366	0.8611
X1*X2	2.05E-20	7.90E-22	26.01260	0.0015
X1*X3	-7.08E-21	3.15E-22	-22.50711	0.0020
X1*D	1.40E-10	8.39E-12	16.64073	0.0036
X2	-2.91E-12	9.49E-14	-30.61951	0.0011
X2^2	1.01E-21	5.11E-23	19.81866	0.0025
X2*X3	-6.01E-22	3.19E-23	-18.87319	0.0028
X2*D	-2.13E-11	9.75E-13	-21.80780	0.0021
X3	1.59E-12	6.02E-14	26.37071	0.0014
X3^2	7.72E-23	4.18E-24	18.47908	0.0029
X3*D	7.39E-12	3.60E-13	20.49234	0.0024
R-squared	0.999471	Mean dependent var	0.000139	
Adjusted R-squared	0.996295	S.D. dependent var	0.000237	
S.E. of regression	1.45E-05	Akaike info criterion	-19.73298	
Sum squared resid	4.18E-10	Schwarz criterion	-19.11934	
Log likelihood	160.9974	F-statistic	314.7434	
Durbin-Watson stat	3.267860	Prob(F-statistic)	0.003171	

Plot Uji Heteroskedastisitas, menggunakan Uji White Cross Term

1989	0.27332	0.24257	0.03075	. . *
1990	0.22668	0.23680	-0.01011	. * .
1991	0.22143	0.23647	-0.01503	* .
1992	0.21159	0.22247	-0.01088	. * .
1993	0.19473	0.19603	-0.00130	. * .
1994	0.20478	0.19774	0.00704	. * .
1995	0.19274	0.19608	-0.00334	. * .
1996	0.20554	0.20445	0.00109	. * .
1997	0.20630	0.21656	-0.01026	. * .
1998	0.23084	0.23345	-0.00261	. * .
1999	0.22921	0.23002	-0.00082	. * .
2000	0.24925	0.23376	0.01549	. *
2001	0.14126	0.13224	0.00901	. * .
2002	0.15536	0.16860	-0.01325	. * .
2003	0.15756	0.15333	0.00423	. * .

Uji Klein 1X X2

Dependent Variable: X1				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:41				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.50E+08	19063740	7.857759	0.0000
X2	0.006032	0.001742	3.463710	0.0042
R-squared	0.479944	Mean dependent var		1.97E+08
Adjusted R-squared	0.439939	S.D. dependent var		69613816
S.E. of regression	52097037	Akaike info criterion		38.49868
Sum squared resid	3.53E+16	Schwarz criterion		38.59309
Log likelihood	-286.7401	F-statistic		11.99729
Durbin-Watson stat	0.189856	Prob(F-statistic)		0.004196

Uji Klein X1 X3

Dependent Variable: X1				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:42				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.25E+08	20377309	6.140479	0.0000
X3	0.003212	0.000742	4.327623	0.0008
R-squared	0.590271	Mean dependent var		1.97E+08
Adjusted R-squared	0.558754	S.D. dependent var		69613816
S.E. of regression	46241924	Akaike info criterion		38.26024
Sum squared resid	2.78E+16	Schwarz criterion		38.35464
Log likelihood	-284.9518	F-statistic		18.72832
Durbin-Watson stat	0.254665	Prob(F-statistic)		0.000820

Uji Klein X1 D

Dependent Variable: X1				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:43				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.79E+08	17607364	10.14173	0.0000
D	90097545	39371263	2.288409	0.0395
R-squared	0.287156	Mean dependent var		1.97E+08
Adjusted R-squared	0.232322	S.D. dependent var		69613816
S.E. of regression	60993698	Akaike info criterion		38.81401
Sum squared resid	4.84E+16	Schwarz criterion		38.90841
Log likelihood	-289.1050	F-statistic		5.236815
Durbin-Watson stat	0.254779	Prob(F-statistic)		0.039499

Uji Klein X2 X3

Dependent Variable: X2				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:44				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.73E+09	6.96E+08	-3.922068	0.0018
X3	0.471292	0.025352	18.59027	0.0000
R-squared	0.863748	Mean dependent var		7.76E+09
Adjusted R-squared	0.860959	S.D. dependent var		7.99E+09
S.E. of regression	1.58E+09	Akaike info criterion		45.32242
Sum squared resid	3.24E+19	Schwarz criterion		45.41683
Log likelihood	-337.9181	F-statistic		345.5981
Durbin-Watson stat	0.752770	Prob(F-statistic)		0.000000

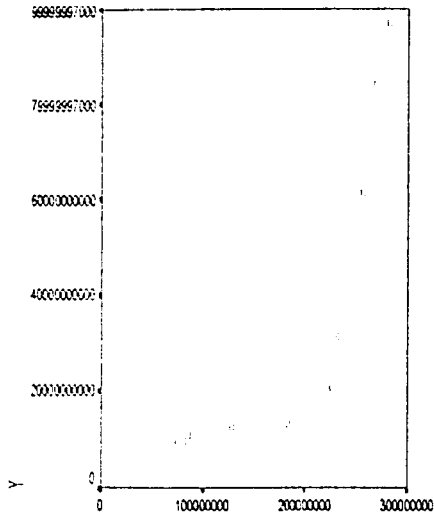
Uji Klein X2 D

Dependent Variable: X2				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:45				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.16E+09	8.76E+08	4.750728	0.0004
D	1.80E+10	1.96E+09	9.172529	0.0000
R-squared	0.866166	Mean dependent var		7.76E+09
Adjusted R-squared	0.855871	S.D. dependent var		7.99E+09
S.E. of regression	3.04E+09	Akaike info criterion		46.62852
Sum squared resid	1.20E+20	Schwarz criterion		46.72292
Log likelihood	-347.7139	F-statistic		84.13529
Durbin-Watson stat	1.614750	Prob(F-statistic)		0.000000

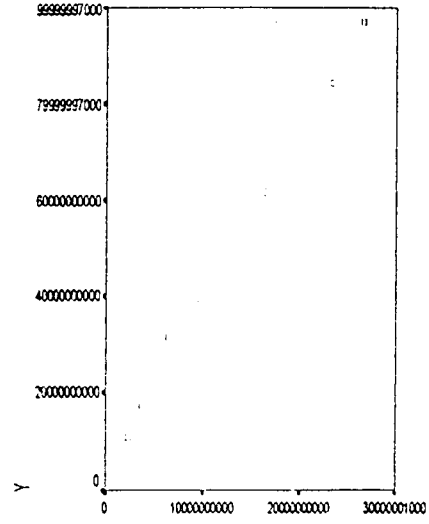
Uji Klein X3 D

Dependent Variable: X3				
Method: Least Squares				
Date: 01/31/05 Time: 15:46				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.53E+10	2.50E+09	6.117675	0.0000
D	3.48E+10	5.59E+09	6.229196	0.0000
R-squared	0.749049	Mean dependent var		2.23E+10
Adjusted R-squared	0.729745	S.D. dependent var		1.67E+10
S.E. of regression	8.66E+09	Akaike info criterion		48.72481
Sum squared resid	9.74E+20	Schwarz criterion		48.81921
Log likelihood	-363.4360	F-statistic		38.80289
Durbin-Watson stat	1.259668	Prob(F-statistic)		0.000031

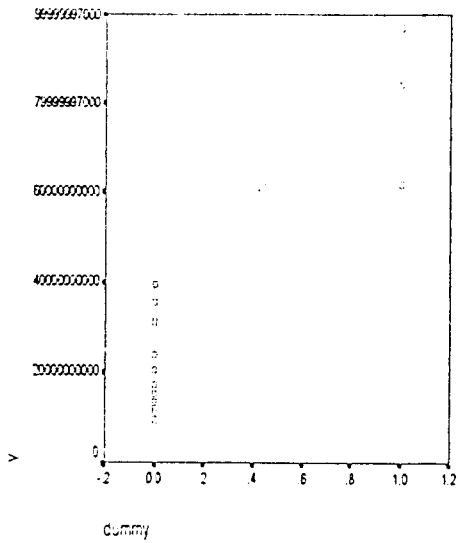
LAMPIRAN XII



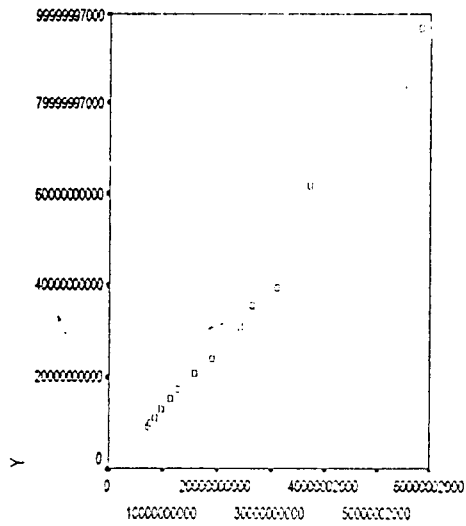
PDRB ril



transfer pemerintah pusat

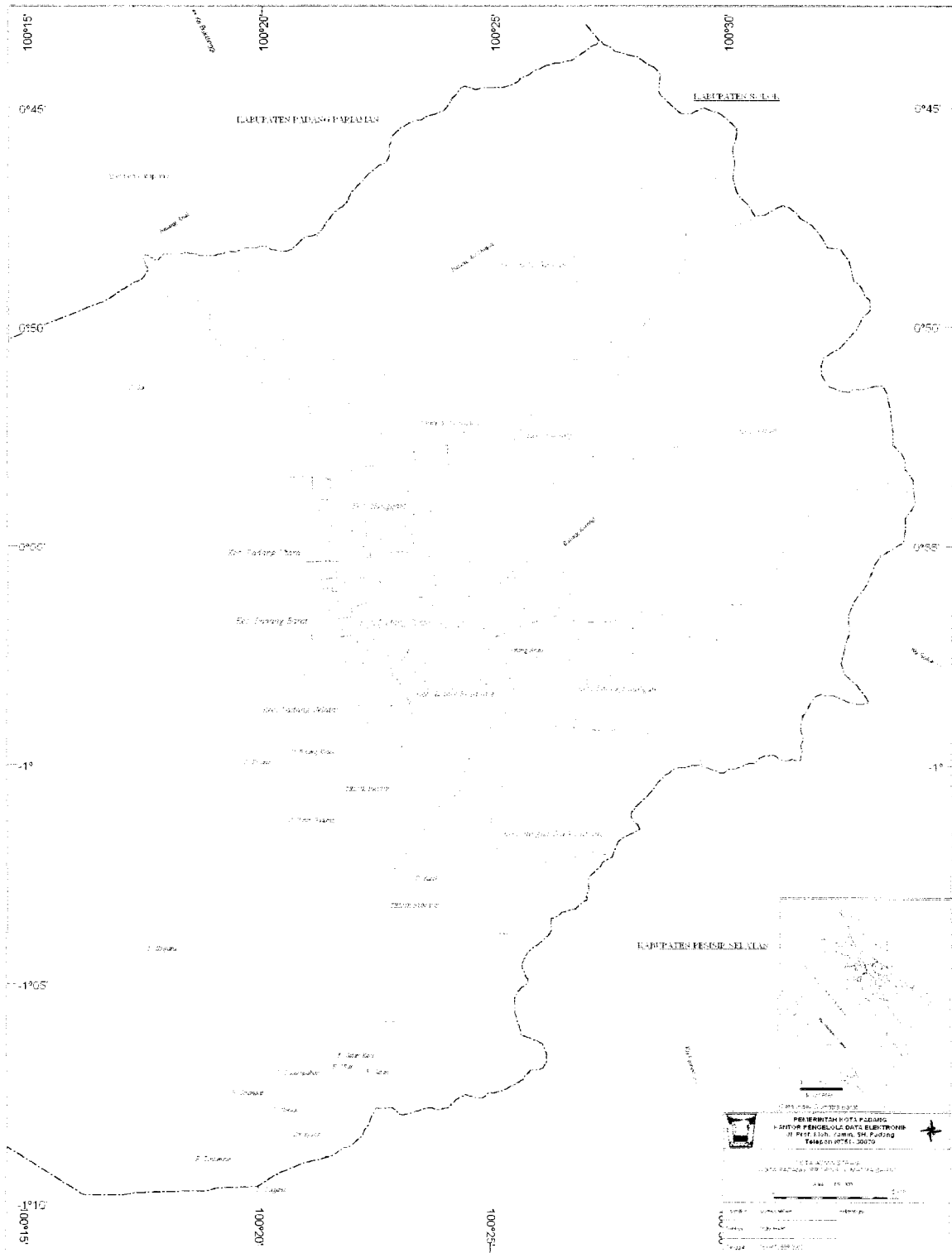


dummy



tabungan pemerintah

PETA KOTA PADANG





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI
No.B.070/1126 /KB-BKL/IX-2004
Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey

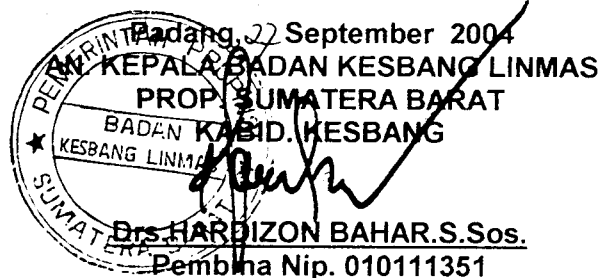
Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Badan Perencanaan Daerah DIY No :070/8314 tanggal 22 September 2004 perihal Permohonan Rekomendasi untuk Penelitian/mengumpulkan data, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama : **BUNGA PARAMITA.**
Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung, 12 Januari 1984.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum. Della Sentosa CC I Mata Air Padang.
No.Kartu Identitas : 01313159.
Maksud /Judul Penelitian : " *Analisis Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah 1992 /1993 - /2002-2003.*"
Lokasi Tempat Penelitian : *Dispenda Prop. Sumbar, BPS Prop.Sumbar, Biro Perekonomian Ktr.Gub. Dan Dispenda Kota Padang.*
Waktu Penelitian : *25 September s/d 25 Oktober 2004*
Anggota :

dengan ketentuan sebagai berikut :

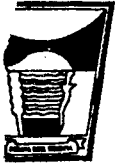
1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jkt.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Padang Cq. Ka Kesbang Linmas di Padang.
4. Sdr. Ka Dispenda Prop. Sumbar di Padang.
5. Sdr.Ka BPS Prop. Sumbar di Padang.
6. Sdr. Ka Biro Perekonomian Ktr.Gubernur di Padang.
7. Sdr. Ka Bapeda DIY di Yokyakarta.



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : Prof. H. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 39439
PADANG

Kode Pos. 25111

REKOMENDASI

Nomor : 070-88/Kesbang/IX-2004

kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Surat dari ..Kabid. Kesbang, Badan Kesbang dan Linmas Prop. Sumbar
Nomor : B.070/1126/KB-BKL/IX-2004 tanggal 27 September 2004
Surat Pernyataan Penanggung jawab Penelitian Ybs tanggal 27 September 2004

Surat ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey/Pemetaan/
di kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : BUNGA PARAMITA
Tempat/Tanggal Lahir : Sijunjung, 12 Januari 1984
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Perum Della Sentosa CC I Mata Air Padang
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/Lama Penelitian : 1 (satu) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL : Analisis Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat & Daerah 1992 /1993- / 2002 - 2003
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : - Dispenda Kota Padang, BPS Kota Padang
Anggota Rombongan : --

Surat ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian

Sambil menunjuk Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud Sdr. kepada Kepala Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian

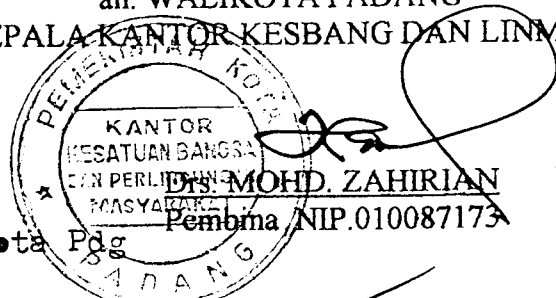
Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat

Selesai Penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 28 September 2004
an. WALIKOTA PADANG

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS



DITERUSKAN KEPADA YTH :

1. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Sdr. Ka. BPS Kota Padang
3. Sdr. Kabid Kesbang, Badan Kesbang & Linmas Prop. Sumbar
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.